

Bagaimana Semuanya Dimulai?
(Negosiasi Penyerahan Wilayah Misi dari SJ kepada SVD
dan Pendirian Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil)
Oleh: Antonio Camnahas, SVD

1. Pendahuluan

Benarlah kata-kata yang menyatakan bahwa satu langkah besar dalam sejarah bermula dari satu ayunan langkah pertama yang sederhana. Karena itu, orang selalu penasaran untuk mengetahui bagaimana langkah awal itu diambil. Tulisan ini akan menyelidiki tapak-tapak historis awal proses penyerahan salah satu wilayah misi Jesuit di Indonesia¹ kepada SVD. Pertanyaan dasarnya adalah: Bagaimana semuanya dimulai? Lewat tulisan ini penulis akan memaparkan keterlibatan empat pihak dalam urusan ini yakni Vikaris Apostolik Batavia selaku pemimpin Gereja Katolik di Hindia Belanda masa itu, Superior Jeneral (= Pemimpin Umum) Serikat Jesus (SJ) yang para misionarisnya bermisi di Hindia Belanda, Superior Jeneral Serikat Sabda Allah (SVD²) sebagai pihak yang ingin mendapat satu wilayah misi baru, dan Propaganda Fide sendiri.³ Sebagai salah satu lembaga penting Takhta Suci Vatikan, Propaganda Fide yang didirikan tahun 1622 ini diberi tanggung jawab untuk mengurus penyebaran iman Katolik ke seluruh dunia. Karena itu, pimpinan lembaga ini bertanggung jawab untuk memfasilitasi pembagian berbagai wilayah misi kepada kongregasi-kongregasi religius-misioner.

Berdasarkan arsip-arsip yang tersedia sudah sejak tahun 1902 ide untuk mengambil-alih salah satu wilayah misi di Hindia Belanda dicetuskan. Pencetus ide itu adalah Friedrich Schwager, Sekretaris Misi SVD pada waktu itu. Ide ini kemudian berkembang dan terus didiskusikan sampai dengan tahun 1912. Tahun yang disebutkan terakhir ini menandai penyerahan, secara *de jure*, wilayah Kepulauan Sunda Kecil kepada SVD. Kendatipun demikian, karena berbagai alasan, maka misionaris pertama SVD baru tiba di pelabuhan Atapupu, Timor, tanggal 20 Januari 1913. Kemudian, penyerahan wilayah misi ini, secara *de facto*, terjadi pada tanggal 1 Maret 1913. Pendirian Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil akhirnya terjadi tidak lama berselang, tepatnya tanggal 16 September 1913, diikuti kemudian dengan penyerahan pulau Flores kepada SVD tanggal 20 Juli 1914. Dengan demikian, tema sejarah ini merangkum periode waktu kurang lebih antara tahun 1902 sampai dengan 1914.

Demi mempermudah alur pemahaman terhadap tema sejarah ini, penulis coba membagi tulisan ini ke dalam tiga periode waktu penting yaitu: *pertama*, periode 1902-1909, di mana

¹ Wilayah yang dewasa ini dikenal dengan nama Indonesia, di abad XVI dikenal oleh orang-orang Eropa dengan nama *East Indies* atau *Malay Archipelago*. Kemudian, ketika kekuasaan Belanda menjadi semakin kuat di abad XVII, wilayah ini mulai dikenal juga dengan nama *Dutch East Indies* atau dalam Bahasa Indonesia disebut Hindia Belanda. Karena itu, dalam tulisan ini pembaca akan cukup sering menjumpai term historis Hindia Belanda ketimbang Indonesia. Kata Indonesia dipakai pertama kali oleh etnolog Inggris, James Richardson Logan pada tahun 1850 dalam bukunya yang berjudul *The Ethnology of the Indian Archipelago*. Seperti dikutip oleh J. W. M. Boelaars, *Indonesianisasi. Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm. 27-28.

² SVD merupakan singkatan dari term Latin, *Societas Verbi Divini*, yang biasa diterjemahkan dengan nama Serikat Sabda Allah.

³ Propaganda Fide adalah dikasteri (= semacam departemen) Takhta Suci Vatikan yang mengurus kegiatan penyebaran iman Katolik ke seluruh dunia. Lembaga ini didirikan oleh Paus Gregorius XV (1621-1623) pada tanggal 22 Juni 1622 dengan bulla *Inscrutabili Divinae Providentiae* untuk menggantikan hak penyebaran iman (hak patronas) yang pernah diserahkan kepada raja Spanyol pada akhir abad XV dan raja Portugis pada awal abad XVI. Cf. Luigi Mezzadri, *Storia della Chiesa tra Medioevo ed Epoca Moderna. Il Grande Disciplinamento*, III, Roma: CLV-Edizioni, 2001, hlm. 348.

terjadi peristiwa-peristiwa sederhana tetapi menentukan yang mendahului negosiasi resmi antara pihak Jesuit dan SVD. *Kedua*, periode 1909-1912 yang menandai dimulainya negosiasi resmi mengenai kemungkinan penyerahan salah satu wilayah misi Jesuit di Indonesia kepada pelayanan para misionaris SVD. Negosiasi ini berpuncak pada kesepakatan mengenai penyerahan wilayah misi Timor dan Sumba sebagai langkah awal menuju pengambilalihan seluruh wilayah misi Kepulauan Sunda Kecil. *Ketiga*, periode legalisasi, konfirmasi dan realisasi yang dimulai dari 1912-1914. Periode ini menandai berbagai keputusan penting berkaitan dengan karya misi di Kepulauan Sunda Kecil. Dua pertanyaan penting yang hendak dijawab lewat periodisasi historis ini, yaitu: Apa saja yang terjadi dalam urusan ini? Mengapa penyerahan wilayah misi itu akhirnya terjadi?

Tulisan ini disusun berdasarkan berbagai dokumen yang dihimpun penulis dari tiga lembaga arsip sekaligus yaitu Arsip Jesuit di Roma (*Archivum Romanum Societatis Iesu*; untuk karya tulis ini akan disingkat ARSI), Arsip Jeneral SVD (*Archivum Generale Societatis Verbi Divini*; disingkat AGSVD) dan Arsip Sejarah Propaganda Fide (*Archivio Storico di Propaganda Fide*; disingkat ASPF), semuanya dapat ditemukan di kota Roma, Italia.⁴ Selain itu, penulis juga memanfaatkan beberapa buku dan sumber lainnya sebagai bahan penunjang.

2. Sekilas Tentang Nama Kepulauan Sunda Kecil

Nama Kepulauan Sunda Kecil yang di masa Portugis dikenal juga dengan nama Kepulauan Solor, dalam Bahasa Latin disebut "*Insularum Sundae Minorum*". Nama ini biasa dipakai untuk menyebut gugusan pulau kecil yang tersebar di bagian tenggara kepulauan Sunda Besar (dan dengan sendirinya juga bagian tenggara Indonesia).⁵ Di atas peta dunia, kepulauan ini terletak di antara 11-22⁰ lintang utara dan 95-132⁰ bujur timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam gugusan Kepulauan Sunda Kecil yakni Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Adonara, Solor, Lembata, Alor, Timor, Sabu, Rote, dan Sumba ditambah beberapa pulau kecil lainnya yang tak berpenghuni.⁶

Berdasarkan PP No. 21/1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 59), pemerintah Republik Indonesia pernah menyatukan seluruh wilayah ini ke dalam satu propinsi saja yang dikenal dengan nama Propinsi Sunda Kecil. Pada tahun 1954, nama Sunda Kecil ini diubah menjadi Nusa Tenggara berdasarkan UU Darurat No. 99/1954, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang, 6 Februari 1958. Selanjutnya, berdasarkan UU No. 64/1958, Propinsi Nusa Tenggara ini dibagi lagi ke dalam tiga daerah Swatantra Tingkat I yakni Daerah Swatantra Bali, Daerah Swatantra Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Daerah Swatantra Nusa Tenggara Timur (NTT).⁷

Jadi, dalam sejarah, wilayah ini dikenal dengan tiga nama yaitu Kepulauan Solor, Kepulauan Sunda Kecil dan Nusa Tenggara. Ketika wilayah ini, sebagai satu wilayah misi, diserahkan kepada tanggung jawab para misionaris SVD, namanya adalah Kepulauan Sunda Kecil.

3. Kilas Balik Karya Misi di Kepulauan Sunda Kecil Sebelum Kedatangan SVD

⁴ Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen ini dalam rangka penulisan tesis pada tahun 2007, ketika menjalani studi tingkat Licenciat (S2) di Universitas Kepausan Gregoriana, Roma, Italia.

⁵ Pulau-pulau yang termasuk dalam gugusan Kepulauan Sunda Besar adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Cf. *The New Encyclopædia Britannica. Macropaedia Knowledge in Depth*, IX, Chicago: Encyclopædia Britannica Inc., 1974, hlm. 459.

⁶ Kurt Piskaty, "The Work of the Divine Word Missionaries in Indonesia", dalam *Verbum SVD* 27 (1986), hlm. 270.

⁷ Cf. "Disepakati, Pembangunan Kawasan Sunda Kecil," *Berita Utama Pos Kupang*, Minggu 21 Desember 2008, hlm. 1. 7.

Agama Kristen pertama kali masuk ke wilayah Kepulauan Sunda Kecil pada abad ke-16. Pada tahun 1555/1556, P. Antonio de Taveiro OP,⁸ seorang pastor kapal, berlayar bersama orang-orang Portugis dari Malaka dan sempat singgah di pantai Timor, Solor, dan Flores daratan (Ende). Di tempat-tempat yang disinggahi itu, dia membaptis sekitar 5000 orang. Hasil baptisan ini kemudian dilaporkannya kepada uskup Malaka waktu itu, Dom Jorge de S. Luzia OP, yang kemudian menugaskan Pembesar Dominikan di Malaka untuk melayani kesejahteraan rohani para baptisan baru itu.⁹

Pada waktu Propaganda Fide belum didirikan, karya penyebaran iman dipercayakan oleh paus-paus tertentu kepada raja Portugis dan raja Spanyol. Mereka diberi tanggung jawab untuk membawa iman Katolik keluar dari benua Eropa. Inilah yang disebut dengan nama “Hak Patronas”. Hak ini diperoleh kedua raja ini karena pada abad XV hanya kapal-kapal dagang mereka yang bisa berlayar menjelajahi dunia. Hak patronas pada intinya mengandung tugas agar kedua raja Katolik tersebut menyebarkan iman Katolik di setiap tempat baru yang mereka taklukkan. Keuskupan Malaka waktu itu merupakan salah satu keuskupan hasil dari hak patronas ini yang berada di bawah tanggung jawab raja Portugal. Inilah yang menjelaskan mengapa ketika menerima laporan P. Antonio de Taveiro OP, uskup Malaka langsung mengambil inisiatif untuk meminta para misionaris Dominikan memulai misi di Solor, tanpa perlu terlebih dahulu menyampaikan hal ini kepada paus.¹⁰

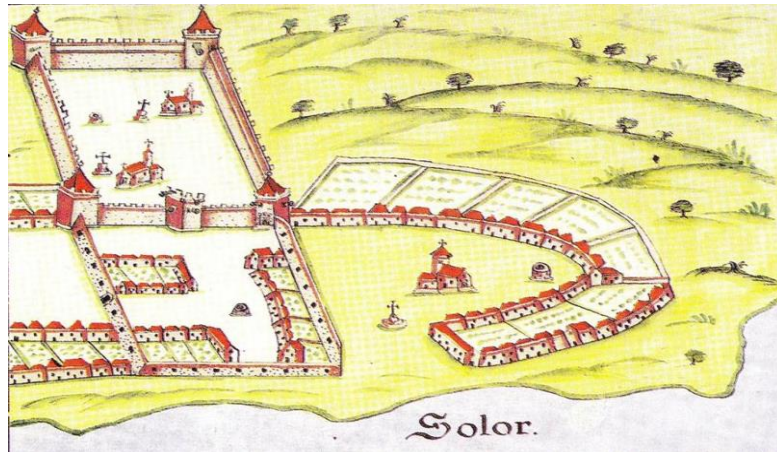
Dua belas tahun kemudian (1562), para misionaris Dominikan dari Malaka mulai menetap dan menjadikan Solor sebagai pusat misi dari mana mereka bergerak untuk melayani wilayah sekitarnya. Orang-orang Dominikan pertama itu adalah P. Antonio da Cruz OP, P. Simão das Chagas OP dan Bruder Alexio OP. Solor dipilih karena terletak di antara pulau Flores, Alor dan Timor. Di situ mereka mendirikan satu benteng, satu gereja dan pemukiman bagi orang Portugis. Mereka juga mendirikan satu sekolah dan seminari untuk mendidik para calon imam, guru, dan pemuka-pemuka kampung yang akan membantu mereka dalam tugas misi. Kemudian, lewat jalur laut, dengan sampan-sampan kecil, mereka bergerak ke Adonara, Flores Timur dan Ende. Tahun 1570, sudah ada dua atau tiga imam yang menetap di pulau Ende dan membangun satu benteng di Numba. Pater Melchior da Luz OP adalah misionaris pertama di Timor, yang pada tahun 1587 bekerja enam bulan lamanya di Mena, dan mungkin juga di Luca, Viqueque (kini: Timor Leste). Dalam tempo beberapa tahun saja, mereka sudah berhasil mendirikan 27 stasi misi dengan jumlah umat sekitar 50.000 jiwa.¹¹

⁸ OP merupakan singkatan dari bahasa Latin, *Ordo Praedicatorum* (= Ordo Para Pewarta Sabda), namun lebih populer dengan sebutan Ordo Dominikan yang diambil-alih dari nama pendiri ordo ini yaitu St. Dominikus de Gúsman.

⁹ F. D. Wellem, “East Nusa Tenggara”, dalam S.W. Sunquist, W.C. Sing, J.C.H. Chea, (eds.), *A Dictionary of Asian Christianity*, Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2001, hlm. 611; bdk. A. J. Möhlmann, “Tenaga-tenaga Imam bagi Gereja di Nusa Tenggara”, dalam *Pastoralia* II (1969), hlm. 1-2; John M. Prior, “The Catholic Church in Indonesia”, dalam Thomas Carson dan Joan Cerrito, (eds.), *New Catholic Encyclopedia*, II, 7 Hol-Jub, Farmington Hills: The Gale Group Inc., 2003, hlm. 428-429.

¹⁰ Bersamaan dengan makin luasnya aksi penaklukan bangsa Portugis atas bangsa-bangsa lain pada abad XV, bertambah pula bulla paus berkaitan dengan “Hak Patronas”. Terhitung sejak tahun 1415 sampai 1500, ada 69 bulla yang diterbitkan. Bulla terpenting berkaitan dengan hak patronas raja Portugal adalah bulla *Fidei constantiam* (1515) dari Paus Leo X (1513-1520). Sementara itu, raja Spanyol mendapatkan hak patronasnya dari Paus Alexander VI (1492-1503) lewat bulla *Eximiae devotionis*, tanggal 3 Mei 1493. Sehari sesudah itu, paus yang sama menerbitkan bulla kedua, dengan judul *Inter coetera* yang dikenal juga dengan nama bulla demarkasi guna menentukan wilayah jelajah bangsa Portugis dan Spanyol. Hal ini disepakati dalam Perjanjian Tordesillas, Spanyol, tahun 1494. Cf. Luigi Mezzadri, *Storia della Chiesa tra Medioevo ed Epoca Moderna. Rinnovamenti, separazioni, missioni, Il Concilio di Trento*, II, Roma: CLV-Edizioni, 2001, hlm. 263-264.

¹¹ John Bot, “Mission History Sketch of Lesser Sunda Islands,” dalam *Mission Buletin*, VII (January, 1955), hlm. 573-574; bdk. F. D. Wellem, *Op. Cit.*, hlm. 611; A. J. Möhlmann, *Loc. Cit.*



Benteng Portugis di Lohayong, Solor

Hasil karya misi yang gemilang ini dirusak seketika oleh perang sipil di antara dua musuh bebuyutan yaitu keluarga Paji dan Demon pada tahun 1598. Keluarga Demon meminta bantuan kepada pihak Portugis, sedangkan keluarga Paji mencari dukungan dari kaum muslim. Pada waktu itu, satu benteng Kristen di Lamakera, Solor Timur, direbut oleh kaum muslim, sedangkan benteng lain di Lohayong berhasil dipertahankan oleh orang-orang Katolik. Tahun 1602, kaum muslim sekali lagi melancarkan serangan ke Lohayong, Paga dan Ende namun tidak berhasil. Dalam satu serangan bajak laut orang-orang Jawa yang terjadi tahun 1606, orang-orang Kristen di Ende dipaksa untuk memeluk agama Islam. Serangan itu menelan korban beberapa imam dan banyak penduduk sipil.¹²

Tanggal 17 Januari 1613, sebuah armada Kompeni Belanda di bawah pimpinan Apollonius Scotte, menggempur benteng Solor dan berhasil menguasainya pada tanggal 20 April tahun yang sama. Karena itu, para misionaris Dominikan mengungsi dari Solor ke Larantuka, Flores Timur, sedangkan para pedagang Portugis lengkap dengan garnisunnya menarik diri ke pantai utara Timor. Baru pada tahun 1618, orang-orang Belanda meninggalkan Flores dan pada waktu itu para misionaris bisa kembali ke tempat misi mereka. Ketika mereka kembali, ditemukan bahwa jumlah umat yang masih tersisa hanya separuhnya saja yaitu 25.000 orang.¹³

Tiga dekade kemudian, Kompeni Belanda kembali muncul di wilayah ini dan berhasil menguasai Sabu, Rote, dan Kupang. Pertahanan Portugis di Lohayong dan Ende pun diakhiri. Dalam satu perjanjian damai antara Portugis dan Belanda tahun 1642, disepakati bahwa Portugis menyerahkan Bali dan Lombok kepada Belanda, sedangkan Larantuka dan Sikka tetap berada di bawah tanggung jawab Portugis. Sekitar tahun 1650, orang-orang Portugis menarik diri ke pantai utara Timor, tepatnya di Lifau, Oekusi (kini: Timor Leste). Kemudian, sekitar tahun 1771, mereka berpindah lagi dari Oekusi ke Dili. Dalam masa ini, umat Katolik di Larantuka dan Sikka dilayani oleh para misionaris dari Timor lewat jalur laut.¹⁴

Sebagai akibat dari berbagai kesulitan dan persaingan dagang antara orang-orang Portugis yang nota bene beragama Katolik melawan orang-orang Belanda yang beragama Protestan, 27 orang misionaris Dominikan menemui ajalnya. Paling kurang ada dua motif utama yang melatarbelakangi kemartiran mereka yaitu: motif iman, artinya mereka mati demi mempertahankan iman Katolik, dan motif dagang dan politik. Dalam persaingan ini, orang-orang Belanda didukung oleh kaum muslim dari beberapa kesultanan di Makasar. Hal ini

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 575; bdk. A. J. Möhlmann, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 576; bdk., J. M. Prior, *Op. Cit.*, hlm. 428.

memaksa para Dominikan terlibat dalam beberapa kali perang di Flores dan Timor guna mempertahankan diri.¹⁵

Dalam perjanjian tanggal 20 April 1859, tanggung jawab misi di Kepulauan Sunda Kecil diambil-alih oleh Belanda. Tahun berikutnya, seorang imam diosesan Belanda (Rm. J. Sanders Pr) tiba di Larantuka, tepatnya 4 Agustus 1860. Namun dia tidak bertahan lama karena sakit sehingga terpaksa diganti oleh seorang imam projo lain yang bernama C. Franssen Pr, Desember 1861. Karena alasan yang sama, Pastor Franssen lalu digantikan oleh imam Jesuit, 17 April 1863. Imam pertama Jesuit yang mendarat di Larantuka, Flores, bernama P. Gregorius Metz SJ. Kedatangannya menandai dimulainya karya misi para imam Jesuit di Kepulauan Sunda Kecil. Pada tahun 1883, imam pertama Jesuit, P. J. Kraaijvanger SJ memulai karya misi di Timor. P. B. Schweitz SJ memulai misi di Sumba pada tahun 1888 yang kemudian ditinggalkan oleh para imam Jesuit tahun 1898 karena kekurangan tenaga misionaris.¹⁶

Menjelang kedatangan SVD ke Kepulauan Sunda Kecil, agama Protestan sangat dominan di pulau Timor, Rote, Sabu dan Sumba. Tak diragukan lagi pada waktu itu bahwa Bali adalah satu “pulau Hindu”, sedangkan Lombok bisa disebut sebagai pulau “hijau” atau pulaunya kaum Muslim. Pada waktu itu, ada 2000 umat Kristen Katolik di Timor yang dilayani oleh 2 imam, sedangkan di Sumba hanya ada 500 orang Katolik tanpa imam. Sementara itu, selain pulau Flores yang memiliki jumlah umat Katolik sekitar 28.000 jiwa, di pulau-pulau lain agama Katolik belum cukup dikenal.¹⁷ Sampai dengan tahun 1930, prosentase para penganut agama asli yang waktu itu disebut kafir berjumlah delapan kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah total penganut Kristen (Katolik dan Protestan), sedangkan prosentase jumlah umat Muslim tiga kali lebih banyak dari total umat Kristen.¹⁸

Waktu	Peristiwa
1555/1556	Baptisan pertama di wilayah Sunda Kecil
1562	Dominikan menetap di Solor
1570	Dominikan menetap di Ende
1587	Dominikan mulai di Timor
1598	Perang Demon dan Paji yang merusak karya misi
1613-1618	Kompeni Belanda kuasai Solor
1642	Portugis serahkan Bali dan Lombok ke Belanda
1650	Portugis menarik diri dari Solor ke Lifau, Oekusi, Timor
1859	Wilayah Sunda Kecil dialihkan ke tangan Belanda
1860	Belanda kirim misionaris pertama, Rm. J. Sanders Pr ke Larantuka
1861	Rm. C. Franssen Pr menggantikan Rm. J. Sanders
1863	Misionaris pertama Jesuit, P. G. Metz ambil-alih misi di Larantuka
1886	P. J. Kraaijvanger SJ memulai misi di Timor

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ J. Bot, *Loc. Cit.* Pater John M. Prior SVD menyebutkan bahwa Jesuit mengambil alih misi Nusa Tenggara pada tahun 1864, berbeda dengan P. Anton Möhlmann SVD yang menyebut tahun 1863, seperti tertera dalam tulisan di atas. Cf. J. M. Prior, *Op. Cit.*, hlm. 428. 429; bdk. A. J. Möhlmann, *Op. Cit.*, hlm. 9. 33.

¹⁷ Cf. Noyen kepada Blum, 6 September 1910, AGSVD 806, 23-24; bdk. Blum kepada Schwager, 6 September 1910, AGSVD BL-4, 601; Schwager kepada Blum, 14 Juni 1910, AGSVD 806, 17. Data tentang jumlah umat Katolik Flores seperti disebutkan di atas diambil dari tulisan A. J. Möhlmann, dengan perincian: 11.000 jiwa di Larantuka dan 17.000 jiwa di Sikka. Bdk. A. J. Möhlmann, *Op. Cit.*, hlm. 14.

¹⁸ Cf. Johannes Thaurén, *Die Missionen der Gesellschaft der Göttlichen Wortes: die Mission in Holländisch Indien*, Nettetal: Steyler Verlag, 1931, hlm. 14.

4. Proses Negosiasi Penyerahan Wilayah Misi kepada SVD

4.1. Mereka Yang Berperan Dalam Urusan Ini

Urusan penyerahan wilayah misi tertentu kepada kongregasi religius tertentu tidak terjadi semudah mengedipkan mata. Ada banyak hal yang terjadi sebelumnya, mulai dari yang basa-basi sampai hal-hal yang serius. Salah satu hal penting yang perlu dibuat adalah negosiasi antar pimpinan, baik di tingkat lokal maupun global, terutama para pimpinan kongregasi religius yang berkaitan langsung dengan urusan serah-terima wilayah misi tertentu. Mengingat urusan ini melibatkan cukup banyak orang, supaya mempermudah pemahaman, berikut ini akan diperkenalkan terlebih dahulu nama-nama ke-15 tokoh kunci, baik dari pihak Takhta Suci Vatikan, SVD, maupun Jesuit.

Lembaga	Tokoh	Peran/Jabatan
Takhta Suci Vatikan	Pius X	Paus ke-257 dalam Gereja Katolik Roma
	Merry Kardinal del Val	Sekretaris Negara Vatikan
	Girolamo Maria Kardinal Gotti	Pimpinan Propaganda Fide
	Giovanni Tacci	Internuntius Vatikan untuk <i>Low Countries</i> termasuk di dalamnya Hindia Belanda
SVD	Arnold Janssen	Pimpinan Umum SVD
	Nikolaus Blum	Wakil Pimpinan Umum SVD yang kemudian menggantikan Arnold Janssen
	Friedrich Schwager	Sekretaris Misi SVD yang bertanggung-jawab untuk urusan karya misi serikat
	Carl Friedrich	Prokurator General SVD yang menangani diplomasi antara SVD dengan Takhta Suci Vatikan
	Constant van den Hemel	Misionaris SVD di Papua Nugini; penemu wilayah misi di Hindia Belanda untuk SVD
	Petrus Noyen	Misionaris pertama SVD di Hindia Belanda
Jesuit	Edmund S. Luypen	Vikaris Apostolik ke-5 untuk Batavia
	F. X. Wernz	Pimpinan Umum Jesuit
	Wlodzimierz Ledóchowski	Wakil Pimpinan Umum Jesuit yang kemudian menggantikan Wernz
	Isidorus Vogels	Provinsial Jesuit di Belanda yang membawahi juga wilayah misi di Hindia Belanda
	Eduard Engbers	Pimpinan Misi Jesuit di Hindia Belanda

4.2. Tiga Peristiwa Penting pra-Negosiasi Resmi (1902-1909)

4.2.1. Steyl “Melirik” Hindia Belanda

Pada tanggal 20 Mei sampai 4 Juli 1905, Arnold Janssen, Pendiri dan Superior Jeneral Serikat Sabda Allah (SVD), berada di Roma untuk beraudiensi dengan Sri Paus Pius X (1903-1914). Audiensi ini dimaksudkan untuk memohon restu Bapak Suci atas Konstitusi

SVD yang baru selesai disusun. Keprihatinan utama Arnold Janssen pada masa itu adalah bagaimana menyiapkan dasar yang baik bagi kongregasi yang baru didirikannya itu. Kunjungan ini merupakan kunjungannya yang ke-9 ke Roma. Pada kesempatan itu, dia juga menyempatkan diri untuk bertatap muka dengan Prefek (= penanggung jawab) Propaganda Fide, Mgr. Girolamo Maria Kardinal Gotti OCD. Pembicaraan mereka berkisar soal kemungkinan mendapatkan satu wilayah misi baru di tempat-tempat di mana iman Kristen belum cukup berakar.¹⁹

Sekembalinya dari kunjungan ini, Arnold Janssen menyampaikan laporannya kepada para Anggota Dewan Jeneral SVD di Steyl, Belanda, terutama mengenai bagian pembicaraannya dengan Kardinal Gotti. Kendatipun hasil pembicaraan itu tidak terlalu menggembirakan mengingat tidak ada daerah misi baru yang tersedia, namun masih ada kemungkinan untuk mendapatkan sebagian wilayah misi di Hindia Belanda. Dalam laporannya, Arnold Janssen menulis demikian, “Saya juga berusaha menarik perhatiannya bahwa ada hasrat besar dalam kongregasi untuk mendapatkan satu wilayah misi di Hindia Belanda atau Jepang. Dia tampak mencatat hal ini.”²⁰

Dalam bulan Februari tahun yang sama, sebelum Arnold berangkat ke Roma, ternyata Jeneralat SVD telah lebih dahulu mendiskusikan kemungkinan untuk mendapat lebih banyak wilayah misi baru di daerah-daerah tropis. Dalam suratnya kepada Anggota Dewan Jeneral SVD tanggal 27 Februari 1905, Arnold Janssen sempat menyebutkan pulau Jawa di Hindia Belanda. Dia sungguh berminat untuk mendapat daerah misi baru di Hindia Belanda. Ide ini diterimanya dengan maksud tersembunyi untuk meningkatkan popularitas SVD di negeri Belanda. Karena keinginannya yang besar untuk tahu lebih banyak mengenai wilayah ini, dia meminta penjelasan yang lebih lengkap mengenai jalur transportasi antar pulau, keadaan iklim, jumlah penduduk dan hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi para misionaris di sana.²¹

Menarik bahwa interese untuk bermisi di Hindia Belanda, khususnya di pulau Jawa, sebenarnya sudah disinggung tiga tahun sebelumnya (1902). Pencetus ide ini adalah Friedrich Schwager, editor majalah “*Steyle-Missionsbote*” (artinya: Bentara Misi-Steyl) pada waktu itu. Dia pernah menyampaikan nota khusus kepada Superior Jeneral SVD, Arnold Janssen. Ketika pertama kali mendengar tentang hal itu, Arnold Janssen sedikit berhati-hati dan penuh pertimbangan. Dia terkesan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari tahu lebih dahulu kehendak Allah dan untuk mempertimbangkannya lebih jauh sebelum sampai pada satu keputusan final. Pada tanggal 26 Maret 1902, Arnold sempat menulis surat kepada wakilnya, Nikolaus Blum, menyangkut nota Schwager tentang kemungkinan membuka misi di pulau Jawa.²²

Berbeda dengan Arnold Janssen, Blum lebih antusias menerima ide itu. Kepada Arnold Janssen, dia menyatakan bahwa mengingat Jeneralat SVD berada di Steyl yang adalah bagian wilayah negeri Belanda, maka wajarlah jika SVD memiliki satu wilayah misi di Hindia Belanda, salah satu koloni Belanda pada waktu itu. Blum juga menyertakan satu-dua informasi dasar mengenai misi Katolik dan Protestan di Hindia Belanda yang disiapkan oleh Schwager sendiri.²³ Karena itu, surat Arnold Janssen tertanggal 27 Februari 1905 seperti dikutip di atas, sebenarnya hanya menindaklanjuti hasil pembicaraannya sebelumnya dengan Nikolaus Blum.

¹⁹ Josef Alt, *The History of the Foundation of Divine Word Missionaries in Rome*, Analecta SVD 87, Roma: Apud Collegium Verbi Divini, 2004, hlm. 300-304.

²⁰ Arnold Janssen kepada Anggota Dewan Jeneral SVD, 8 Juli 1905, AGSVD.

²¹ Arnold Janssen kepada Anggota Dewan Jeneral SVD, 27 Februari 1905, AGSVD 8.322, 13.

²² Arnold Janssen kepada Nikolaus Blum, 26 Maret 1902, AGSVD TR XX.

²³ Nikolaus Blum kepada Arnold Janssen, 24 Februari 1902, AGSVD 8325.

4.2.2. Kontak Awal dengan Para Jesuit di Hindia Belanda

Pada tanggal 14 Februari 1904, Constant van den Hemel, seorang imam misionaris SVD yang berkarya di Papua Nugini, berangkat ke Batavia untuk berbelanja. Di sana dia menginap di rumah imam-imam Jesuit. Barang-barang yang dibeli pada kesempatan itu adalah 6 karton benih tanaman dan 10 ekor sapi.²⁴ Seminggu kemudian (21 Januari 1904), dia menulis surat kepada Arnold Janssen untuk menyampaikan harapan uskup Batavia (Mgr. Edmund Sybrand Luypen SJ)²⁵ dan para imam Jesuit agar relasi baik antara Jesuit dan SVD diteruskan di masa-masa mendatang. Selain itu, dia juga menginformasikan bahwa para Jesuit menawarkan sanatorium mereka di Sulawesi Utara bagi tiap dua misionaris yang perlu memulihkan kesehatannya. Biaya yang harus ditanggung hanyalah biaya perawatan, sedangkan penginapan selama tiga bulan dan kebutuhan lainnya tidak dikenakan biaya sama sekali. Anggota Dewan Jeneral menyambut baik niat baik para Jesuit ini, ketika mereka bersidang tanggal 14 Maret 1904 mengenai tawaran untuk bermisi di Papua Belanda (sekarang bagian wilayah Indonesia).²⁶

Surat van den Hemel ini seakan membawa satu titik terang di tengah kekelaman niat untuk mendapatkan satu misi baru di Hindia Belanda. Karena itu, Arnold Janssen, dengan tatapan visionernya, menyimpulkan bahwa jalan mulai terkuak menuju realisasi rencana tersebut. Dia bahkan melihat surat ini sebagai pratanda awal yang baik bahwa suatu saat nanti para Jesuit di Hindia Belanda akan merelakan satu bagian dari wilayah misi mereka kepada SVD.²⁷ Sejak saat itu, membina relasi baik dengan para Jesuit tampaknya merupakan sesuatu yang sangat penting buat Arnold Janssen. Itulah yang menggugah Arnold Janssen untuk tidak segan-segan meminta sekretarisnya (P. Herman auf der Heide SVD) menulis surat terima kasih kepada uskup Batavia. Dia bahkan menganjurkan agar Prefek Apostolik Papua Nugini (Mgr. Eberhard Limbrock SVD) sendiri perlu menulis surat ke Mgr. Luypen untuk berterima kasih atas sambutan baik yang dialami oleh Constant van den Hemel. Uskup Luypen sendiri kemudian membalas surat auf der Heide tanggal 30 Maret 1904.²⁸

4.2.3. Cari Sawah Dapat “Kebun Anggur”: Sinyalemen Tiga Tempat Misi Bagi SVD

Dalam bulan April 1909, Constant van den Hemel mendapat penugasan dari Mgr. Limbrock untuk menyelidiki kemungkinan bagaimana cara menanam padi yang baik. Untuk maksud itu, van den Hemel mesti bertolak ke Saigon, Bangkok dan Batavia. Sayangnya, dia tidak bisa melihat apa yang diharapkannya di Saigon dan Bangkok karena waktu itu adalah pertengahan musim kering. Dia kemudian meneruskan perjalanannya ke Batavia dan tiba di sana 15 April 1909. Pada kesempatan pertama, dia bertemu dengan Mgr. Luypen.²⁹

²⁴ Cf. Van den Hemel kepada Arnold Janssen, 21 Januari 1904, AGSVD 65.445.

²⁵ Dia adalah Vikaris Apostolik Batavia V dari 1898-1923. Tahun 1891 dia bekerja sebagai pastor Maumere sampai dipilih oleh Paus Leo XIII (1878-1903) menjadi Vikaris Apostolik Batavia, tanggal 21 Mei 1898. Selama masa kepemimpinannya, Vikariat Apostolik Batavia dibagi ke dalam 5 prefektur apostolik. Cf. Kurt Piskaty, “Verhandlungen zur Übernahme Unserer Mission in Indonesien”, dalam *Verbum 4* (1962), hlm. 55; bdk., G. Vriens, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia: Wilayah Tunggal Prefektur-Vikariat Apostolik, Abad 19 dan Abad 20*, II, Jakarta: Dokpen KWI, 1972, hlm. 68. 69. 74.

²⁶ P. S. Laan, “Steysl Frühes Interesse an Indonesien”, *Verbum SVD 5* (9163), hlm. 438; bdk. Josef Alt, *Arnold Janssen SVD. Letters to New Guinea and Australia*. Analecta SVD 79, Romae: Apud Collegium Verbi Divini, 2001, hlm. 230.

²⁷ Arnold Janssen kepada Anggota Dewan Jeneral SVD, 27 Februari 1905, AGSVD 8.322; bdk. J. Alt, *Journey in Faith: The Missionary Life of Arnold Janssen*, translated by Frank Mansfield and Jacqueline Mulberge, Analecta SVD 85, Roma: Apud Collegium Verbi Divini, 2002, hlm. 700.

²⁸ J. Alt, *Journey in Faith*, hlm. 1035; bdk. Arnold Janssen kepada Limbrock, 24 April 1904, AGSVD 34.333f; Luypen kepada auf der Heide, 30 Maret 1904, AGSVD 65. 446.

²⁹ K. Piskaty, *Op. Cit.*, dalam *Verbum 4* (1962), hlm. 60-61.

Selama liburan Paska, van den Hemel berangkat ke Semarang untuk mengunjungi saudaranya yang dijumpainya 5 tahun sebelumnya di Batavia. Dalam perjalanan itu, dia mampir sebentar di salah satu stasi misi para Jesuit di Bandung. Di situ mereka sempat berbicara mengenai kebutuhan akan tenaga misionaris untuk karya misi dan para Jesuit menegaskan bahwa Filipina sangat membutuhkan tenaga seperti itu. Tak disangka, ternyata van den Hemel menyesalkan bahwa masih terlalu banyak yang mesti dibuat di Hindia Belanda. P. Timmers SJ menimpali bahwa Jesuit akan dengan senang hati merelakan sebagian wilayah misinya kepada kongregasi lain, namun kepada kongregasi mana belum bisa dipastikan. Tanpa ragu sedikit pun, Constant van den Hemel langsung menyatakan bahwa SVD bersedia untuk menerima tawaran tugas seperti itu. Pernyataan kesediaan ini kemudian diteruskan pastor Timmers kepada Vikaris Apostolik Batavia.

Sebelum mencapai Semarang, van den Hemel juga sempat singgah di Muntilan, dan bertemu dengan beberapa imam Jesuit di situ. Pembicaraan mereka kurang lebih berkisar pada topik yang sama. Constant van den Hemel juga mengungkapkan kesediaan yang sama. Merasa tertarik dengan pembicaraan ini, P. Mertens SJ kemudian melaporkan pembicaraan itu kepada pembesar kongregasinya di Surabaya, P. Eduard Engbers SJ.

Dalam waktu singkat reaksi datang dari dua arah berbeda: Surabaya dan Batavia. Pater Engbers menulis satu tanggapan lumayan panjang kepada P. Mertens. Nada dasar suratnya sedikit pesimis mengingat belum lama berselang, Jesuit telah mengalihkan Kalimantan kepada para misionaris Kapusin (1905), dan lebih dahulu dari itu, kepulauan Kei dan Papua Belanda kepada para misionaris MSC (1902). Dua pembagian wilayah ini telah menciptakan kesulitan tersendiri bagi Vikaris Apostolik Batavia dalam urusan dengan pemerintah kolonial Belanda. Masalahnya adalah pemerintah Hindia Belanda tidak terlalu simpatik dengan misionaris asing dari bangsa lain. Selain itu, misionaris dari kongregasi lain umumnya memiliki cara pandang dan cara kerja versi mereka sendiri. Hal-hal seperti ini sedikitnya telah menimbulkan konflik dengan pihak pemerintah. Lebih jauh, dalam nada sedikit diplomatis, Engbers menyatakan bahwa pada prinsipnya Jesuit tidak berkeberatan dengan pembagian wilayah misi seperti ini. Namun yang berkompeten untuk urusan ini adalah Vikaris Apostolik Batavia, satu-satunya pimpinan Gereja di wilayah Hindia Belanda yang diberi wewenang untuk berurusan dengan pemerintah. Hal ini sudah digariskan secara jelas dalam Konvensi 1847 antara Takhta Suci Vatikan dan pemerintah Belanda. Konvensi ini pada intinya mengenal Batavia sebagai satu-satunya Vikariat Apostolik untuk seluruh wilayah Hindia Belanda. Dampak lanjut dari konvensi ini yakni di seluruh wilayah Hindia Belanda, hanya sejumlah kecil imam yang rela diangkat oleh pemerintah sebagai “pastor” dengan jaminan gaji lumayan tinggi.³⁰

Dari Batavia, Luypen memberi tanggapan kepada Timmers dengan menyebutkan bahwa SVD bisa mengambil-alih Sumatera jika para imam Kapusin yang ditawarkan pulau itu menolaknya. Pernyataan uskup ini dikutip oleh Constant van den Hemel dalam suratnya kepada Nikolaus Blum,³¹ 21 April 1909, dengan harapan agar SVD bisa mengambil langkah pendekatan yang perlu dengan Provinsial Kapusin di Belanda. Selanjutnya, van den Hemel juga menyebutkan bahwa karena Jesuit hanya ingin mempertahankan Jawa sebagai wilayah misi mereka, maka ada kemungkinan bahwa wilayah misi di Flores juga akan dialihkan.

³⁰ G. Vriens, *Op. Cit.*, hlm. 70. 215.

³¹ Arnold Janssen meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1909. Karena itu, Nikolaus Blum meneruskan kepemimpinannya dalam status sebagai seorang Administrator Jeneral. Blum kemudian terpilih menjadi Superior Jeneral II dalam Kapitel Jeneral SVD IV, 5 Nopember 1909, dan sejak saat itu memimpin kongregasi religius ini sampai 1919. Cf. J. Alt, *Journey in Faith*, hlm. 1032; bdk. Fritz Bornemann, *A History of Our Society*, *Analecta SVD* 54, Rome: Apud Collegium Verbi Divini, 1981, hlm. 36. 38; Kurt Piskaty dan Joanes Riberu, *Nusa Tenggara: 50 Jahre Steyler Missionare in Indonesien* (1913-1963), Nettetal: Steyler Verlag, 1963, hlm. 14.

Sementara itu, misi di Timor terancam ditinggalkan para Jesuit karena iklimnya kurang sehat dan kurang menjanjikan sukses yang diharapkan. Singkatnya, ada tiga kemungkinan wilayah misi yang bisa diambil-alih oleh SVD pada waktu itu yakni Sumatera, Flores dan Timor.³²

Menanggapi surat van den Hemel, Blum tampaknya tidak terlalu antusias dengan Sumatera dengan alasan di sana sudah ada banyak umat Muslim dan Protestan sehingga peluang untuk memenangkan lebih banyak orang ke dalam rangkulan ibunda Gereja Katolik sangat minim. Sebaliknya, dia malah lebih terkesan dengan Flores dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dia juga tidak mau mengintervensi urusan Kapusin menyangkut Sumatera dan memilih untuk membiarkan mereka menentukan sikap sendiri.³³

Waktu	Peristiwa
1902	Ide awal dicetuskan dalam SVD untuk bermisi di Jawa
1904	Perkenalan dan kontak tahap awal dengan Jesuit di Jawa
Feb 1905	Arnold Janssen berbicara dengan Anggota Dewan Jeneral SVD tentang kemungkinan bermisi di Jawa
Juli 1905	SVD menyampaikan keinginannya kepada Prop. Fide
15 Jan 1909	Arnold Janssen meninggal dunia. Urusan selanjutnya ditangani oleh Nikolaus Blum
April 1909	Perkenalan dan kontak tahap kedua dengan Jesuit. SVD ditawarkan Sumatera, Flores dan Timor
Mei 1909	Blum lebih tertarik dengan Kepulauan Sunda Kecil

4.3. Negosiasi Resmi (1909-1912)

4.3.1. Blum Coba Meyakinkan Luypen

Surat van den Hemel kepada Nikolaus Blum tertanggal 21 April 1909 ini dengan segera mendapat tanggapan positif. Blum, selaku Administrator Jeneral SVD pasca kematian Arnold Janssen, menulis surat perdananya kepada Mgr. Luypen tanggal 24 Juni 1909. Selaku pimpinan *ad interim* kongregasi, Blum menemukan beberapa alasan baik untuk menulis kepada sang uskup. Alasan-alasan itu, dapat disebutkan, antara lain: *pertama*, untuk menyampaikan terima kasih kepadanya atas penerimaan baik yang ditunjukkan olehnya dan para misionaris Jesuit kepada van den Hemel; *kedua*, untuk mendapatkan kejelasan mengenai apa yang ditulis oleh van den Hemel mengenai kemungkinan memperoleh wilayah misi di Hindia Belanda; *ketiga*, untuk meyakinkannya bahwa SVD siap untuk menerima misi baru yang akan dialihkan; dan *keempat*, untuk menyampaikan preferensi SVD mengenai wilayah misi yang ingin diperoleh di Hindia Belanda.

Dari surat van den Hemel tersebut di atas, Blum menangkap sinyalemen mengenai kekurangan tenaga misionaris Jesuit untuk melayani wilayah misi yang mahal luas di Hindia Belanda dan kebutuhan Jesuit akan uluran tangan para misionaris dari kongregasi lain. Blum menyatakan bahwa SVD siap untuk memberikan uluran tangan dimaksud sekalipun kongregasinya sendiri kekurangan tenaga misionaris. Kepada Luypen, Blum menulis, “Kami sungguh menyadari berbagai pengorbanan yang dituntut dari tugas seperti ini, namun berkaitan dengan urusan keselamatan jiwa-jiwa yang tak dapat mati, kami tidak mungkin berkata lain selain, ‘*Ecce, adsumus!*’ (artinya: inilah kami!).”³⁴

³² Van den Hemel kepada Blum, 21 April 1909, AGSVD.

³³ Blum kepada van den Hemel, 22 Mei 1909, AGSVD 806.

³⁴ Blum kepada Luypen, 24 Juni 1909, AGSVD BL-2, 728.

Berkaitan dengan pembagian teritori yang mungkin tidak disetujui pemerintah kolonial dan menggiring Gereja ke dalam kesulitan yang tidak perlu, Blum menegaskan bahwa SVD bisa melayani misi tanpa memiliki wilayah yurisdiksinya sendiri. Para misionaris SVD bisa bekerja di bawah yurisdiksi Vikaris Apostolik Batavia, namun di bawah Pemimpin Misi mereka sendiri yang ditunjuk oleh serikat (SVD). Karena itu, para misionaris SVD memang mesti memperoleh yurisdiksi dan penempatan kerjanya dari Vikaris Apostolik Batavia, yang tentu saja tetap memiliki hak visitasi atas wilayah tersebut. Menurut Blum, akan lebih baik jika imam-imam SVD bekerja di tempat mereka sendiri tanpa campur tangan dari para imam Jesuit. Sementara itu, urusan pengalihan wilayah misi kepada pihak SVD bisa didiskusikan lebih kemudian pada kesempatan yang lebih tampan, sesudah uskup Batavia memberikan yurisdiksi.

Yang menarik adalah bahwa dalam surat perdananya kepada Luypen ini, Blum masih tetap pada pendiriannya yang semula untuk mengambil-alih sebagian dari wilayah misi Kepulauan Sunda Kecil daripada Sumatera. Pilihan ini sama persis dengan pilihannya seperti pernah dinyatakan dalam suratnya kepada Constant van den Hemel, 22 Mei 1909.

4.3.2. *Luypen Menjanjikan Pembagian Wilayah*

Di luar dugaan, ternyata surat Blum kepada Uskup Luypen tertanggal 24 Juni 1909 tersebut tidak mendapat balasan segera seperti diharapkan. Kesabaran Blum dalam menanti surat balasan dari Batavia diuji selama lima setengah bulan. Mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan surat Blum?

Surat balasan yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba di Steyl, bertanggal 8 Desember 1909, dan berisi penjelasan mengenai alasan keterlambatannya. Persoalannya bukan pada Blum seperti dugaan di atas tetapi pada Mgr. Luypen. Perjalanan visitasinya yang lama dan melelahkan ke daerah-daerah misi di pelosok, telah menggerogoti kesehatan Mgr. Luypen sehingga beliau jatuh sakit. Dalam suratnya ini juga, Luypen sempat menyinggung masalah kekurangan tenaga imam yang melayani wilayah misi di Hindia Belanda yang amat luas. Sebagai contoh, dia menyebutkan “Timor sebagai satu misi yang indah” namun yang terancam ditelantarkan lantaran masalah tersebut. Luypen tampaknya tidak menanggapi anjuran Blum mengenai kemungkinan bagi para misionaris SVD untuk bekerja di bawah yurisdiksinya. Rupanya Luypen masih enggan untuk berurusan lagi dengan soal pembagian wilayah atau mendatangkan misionaris dari kongregasi lain, mengingat urusan itu baru saja dibuatnya 4 tahun berselang (1905) dengan pihak Kapusin ketika Kalimantan diserahkan kepada mereka. Kesulitan Gereja berhadapan dengan pemerintah kolonial akibat pembagian wilayah yang terjadi tahun 1902 dan 1905 masih mengiang dalam hatinya dan tentu saja dia tidak mau lagi menggores luka tersebut yang sudah hampir sembuh. Kemungkinan besar kecemasan inilah yang menjadi alasan utama Luypen untuk tidak menanggapi anjuran Blum.³⁵

Kendatipun demikian, harapan belum pupus. Memang anjuran Blum tidak ditanggapinya namun Luypen berjanji untuk membicarakan hal itu pada pembagian wilayah misi tahap berikutnya, tanpa menyebut batasan waktu yang pasti. Mengenai soal ini, Luypen menulis demikian, “Saya amat berterima kasih atas surat Anda (= *Your Reverence*); Sekarang saya tahu siapa yang perlu diutamakan manakala tiba waktunya menyampaikan permohonan kepada Propaganda Fide menyangkut pembagian wilayah misi ini di masa depan”.³⁶

4.3.3. *Kunjungan Yang Lama Dinanti*

³⁵ Luypen kepada Blum, 8 Desember 1909, AGSVD 806, 14.

³⁶ Luypen kepada Blum, 8 Desember 1909, AGSVD 806, 14.

Tanggapan Luypen dalam surat tertanggal 8 Desember 1909 di atas terkesan memperlambat laju negosiasi. Selain itu, sesudah surat itu, praktisnya komunikasi tertulis terhenti selama lima setengah bulan. Inilah ujian kesabaran tahap kedua buat Blum. Kendatipun demikian, sebagai seorang superior jenderal yang tekun, Blum tidak berputus asa. Ketidakpastian ini diakhiri dengan tibanya surat Luypen berikutnya tertanggal 22 Mei 1910. Dalam surat ini, Luypen berjanji untuk berkunjung ke Steyl antara bulan Juni atau sesudahnya dalam kesempatan liburan musim panasnya di Belanda.³⁷

Guna mengisi masa penantian tibanya kunjungan, sebagai persiapan menyongsong pertemuan dengan Luypen, Blum berusaha mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang lebih komprehensif tentang misi di Hindia Belanda. P. Friedrich Schwager SVD selaku sekretaris misinya pada waktu itu, diberinya tugas untuk menyiapkan satu memo khusus tentang misi dimaksud.

Tanggal 14 April 1910 Schwager memberikan kepada Blum satu deskripsi menyeluruh tentang misi di Hindia Belanda. Menurut Schwager, menyangkut wilayah, ada beberapa kemungkinan pilihan. Dia menyebut Sumatera, khususnya wilayah sekitar danau Toba, yang statusnya masih menanti kepastian dari pihak Kapusin. Dia juga menyertakan informasi mengenai Jawa, Sulawesi, dan Kepulauan Sunda Kecil. Yang jelas, Jesuit hanya ingin mempertahankan Jawa sebagai wilayah misi mereka. Sebenarnya pilihan terhadap Jawa lebih menjanjikan sebab pulau ini sangat penting secara politis dan ekonomis untuk seluruh Hindia Belanda. Karena itu, dia menganjurkan agar Blum meminta dari Luypen sebagian dari pulau Jawa, Sulawesi atau Kepulauan Sunda Kecil. Ada kemungkinan bahwa Jesuit akan menyerahkan Sumatera kepada SVD sebab mereka tidak akan kehilangan apa pun dari sana. Selain itu, Jesuit terkesan tidak akan mampu mempertahankan Sulawesi dan Sunda Kecil untuk jangka waktu yang lebih lama. Menyangkut Flores dan Sulawesi, Schwager menduga bahwa Luypen akan lebih cenderung untuk menyerahkan Sulawesi daripada Flores. Mau atau tidak, pada akhirnya SVD mesti puas dengan tawaran seperti ini.³⁸

Empat hari sesudah itu, Schwager mengirimkan lagi sepucuk surat kepada Blum yang kali ini berisi informasi lebih detail mengenai Sulawesi dan Kepulauan Sunda Kecil. Dia menyatakan bahwa SVD bisa meminta Luypen untuk menyerahkan atau Sulawesi atau bagian barat Kepulauan Sunda Kecil, khususnya pulau Bali, Lombok, Sumbawa dan Sumba. Flores pasti tidak akan dilepaskan oleh Jesuit. Dengan demikian, SVD akan mewarisi sekelompok kecil umat Kristen dari Minahasa di Sulawesi dan Kepulauan Sunda Kecil. Schwager juga sempat menyebutkan komposisi jumlah penduduk di kedua wilayah ini. Sulawesi memiliki satu setengah juta penduduk, di mana mayoritasnya menganut Islam, sedangkan Kepulauan Sunda Kecil banyak penduduknya masih memeluk agama asli. Ada juga hubungan laut antara Bali dan Sulawesi, hal mana bisa memberi keuntungan tersendiri bagi misi.³⁹

Semua informasi tersebut membekali Blum dengan beberapa anjuran konkret yang akan disampaikan kepada Luypen. Sesudah itu, Blum menjadi semakin tidak sabar menanti tibanya hari kunjungan tersebut. Tanggal 22 Juni 1910, dia menulis kepada Schwager bahwa Mgr. Luypen belum datang ke Steyl. Dia malah berencana untuk mencari sendiri di mana uskup itu berada, jika beliau ingkar janji untuk berkunjung ke Steyl.⁴⁰ Satu minggu kemudian, Blum menginformasikan kepada Schwager bahwa Mgr. Luypen ada di Italia dan bahwa dia akan datang ke Steyl setelah kembali ke Belanda.⁴¹ Tanggal 6 Juli 1910, sekali lagi

³⁷ Luypen kepada Blum, 22 Mei 1910, AGSVD 806, 15.

³⁸ Schwager kepada Blum, 14 Juni 1910, AGSVD 806, 16-17.

³⁹ Schwager kepada Blum, 18 Juni 1910, AGSVD 806, 18-19.

⁴⁰ Blum kepada Schwager, 22 Juni 1910, AGSVD BL-4, 199.

⁴¹ Blum kepada Schwager, 30 Juni 1910, AGSVD BL-4, 236.

Blum menyampaikan bahwa tidak ada lagi berita dari Luypen, dan dia ingin memastikan apakah uskup itu sudah kembali dari Roma ke Belanda. Sampai dengan 22 Agustus 1910, Mgr. Luypen belum juga berkunjung bahkan menyampaikan berita pun tidak.⁴² Akhirnya, Blum berhasil menemukan alamat Luypen dari P. Th. C. Ibelsloot SJ, Rektor Katwijk bij Leiden (Belanda).⁴³ Kemudian, dia mengirim surat kepada Luypen untuk mengundangnya datang ke Steyl.⁴⁴ Uskup Luypen pun menanggapi dengan penyampaian bahwa dirinya akan berkunjung ke Steyl pada tanggal 6 September 1910.⁴⁵ Kunjungan yang lama dinantikan itu akhirnya terealisasi pada tanggal tersebut.

4.3.4. Akhirnya Mgr. Luypen Tiba di Steyl

Pada tanggal 6 September 1910, Blum meninggalkan satu catatan singkat di buku hariannya sebagai berikut, "...Jelang jam 3 sore, Mgr. Luypen, Vikaris Apostolik Batavia, datang. ...Saya telah menulis surat kepadanya tahun 1909 bahwa kami ingin mendapat satu tempat misi di Hindia Belanda. Namun, dia berlaku seolah-olah tidak tahu mengenai isi surat tersebut."⁴⁶

Dalam buku harian Blum tidak ada uraian mendetail mengenai isi pembicaraan keduanya. Isi pembicaraan itu diketahui dari tulisan Blum sendiri kepada Schwager pada hari yang sama, di dalamnya dinyatakan bahwa Sumatera sudah dijadikan prefektur apostolik baru bagi Kapusin dan Jesuit ingin mempertahankan Jawa, termasuk Sulawesi dan Flores. Dengan demikian, SVD bisa memperjuangkan pengambilalihan Timor-Belanda (sekarang: Timor Barat), Sumba, Sumbawa, Bali, Lombok, juga Solor dan Rote, semuanya merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Kecil. Kendatipun demikian, Mgr. Luypen menyatakan bahwa rencana ini masih bersifat tentatif karena masih perlu dibicarakan dengan *Superior Regularis Missionis* Jesuit di Hindia Belanda, P. Eduard Engbers SJ. Blum sendiri juga menyatakan akan membahas hasil pertemuan tersebut dengan anggota Dewannya.⁴⁷

Selama pembicaraan berlangsung, mereka juga sempat menyinggung mengenai kemungkinan pengambilalihan Sulawesi. Namun Blum tidak mau bergeser sedikit pun dari rencana awalnya yaitu ingin mendapat sebagian atau semua Kepulauan Sunda Kecil. Hal ini yang dipegang teguh dalam negosiasi-negosiasi ikutannya.

Sesudah pertemuan itu, Blum menulis lagi surat kepada Luypen, di dalamnya antara lain dia coba menunjukkan pulau-pulau itu secara lebih jelas lengkap dengan satu sketsa map pulau-pulau yang hendak diserahkan kepada SVD yaitu Timor, Rote, Sabu, Sumba, Sumbawa, Lombok, Bali, dll.⁴⁸ Luypen menjawab surat Blum dari 's-Gravenhage, Belanda, dan menyampaikan bahwa surat kepada *Superior Regularis Missionis* Jesuit di Hindia Belanda mengenai hasil pembicaraan di Steyl sudah dikirim. Luypen juga menyatakan bahwa negosiasi lanjutan akan sangat ditentukan oleh keputusan Pater Engbers. Sementara itu, menyangkut sketsa map, Luypen mensinyalir adanya kesalahan karena di dalamnya disertakan juga beberapa pulau yang sebenarnya termasuk dalam distrik lain, seperti Madura dan Sulawesi. Padahal, Jesuit hanya mau menyerahkan pulau-pulau yang berada di bawah *residentie* (= distrik) Timor dan Bali.⁴⁹ Sebenarnya sketsa map yang tidak akurat itu

⁴² Blum kepada Schwager, 22 Agustus 1910, AGSVD BL-4, 601-602.

⁴³ Ibelsloot kepada Blum, 1 Agustus 1910, AGSVD 806, 20. Alamat Mgr. Luypen di Belanda waktu itu adalah van Vollenhovenstraat no. 1 Rotterdam.

⁴⁴ Blum kepada Luypen, 28 Agustus 1910, AGSVD BL-4, 553.

⁴⁵ Luypen kepada Blum, 3 September 1910, AGSVD 806, 21.

⁴⁶ Tagebuch Blum, 6 September 1910, AGSVD 291.

⁴⁷ Blum kepada Schwager, 6 September 1910, AGSVD BL-4, 601-602; bdk. Tagebuch Blum, 6 September 1910, AGSVD 291.

⁴⁸ Blum kepada Luypen, 15 September 1910, AGSVD BL-4, 654-655.

⁴⁹ Luypen kepada Blum, 20 September 1910, AGSVD 806, 25-26.

dipersiapkan oleh P. Johann Bodems SVD, Wakil Superior Jeneral. Terhadap kesalahan ini, Blum berjanji untuk mengirimkan sekali lagi map yang lebih akurat guna mendapatkan pengesahan dari Mgr. Luypen.⁵⁰

Berita tentang kunjungan Luypen ke Steyl sempat sampai ke telinga P. Petrus Noyen SVD, calon misionaris perdana untuk Kepulauan Sunda Kecil. Karena itu, Noyen pun menulis kepada Blum, yang antara lain menyatakan bahwa sebenarnya Jesuit berencana untuk membagi seluruh wilayah misi di Hindia Belanda kepada kongregasi lain, kecuali pulau Jawa. Karena itu, Noyen berharap agar Jeneralat SVD memperjuangkan pengambilalihan Flores, dengan alasan di sana sudah ada komunitas kristiani yang baik dengan jumlah umat yang memadai. Sumatera tidak menarik perhatian Noyen.⁵¹

4.3.5. “Kabar Gembira” dari Engbers

Selang tiga bulan lebih, masih dari Belanda, Mgr. Luypen meneruskan berita gembira dari P. Engbers SJ, pembesar misi Jesuit di Hindia Belanda. Ada tiga hal yang disebutkan Luypen, yaitu: *pertama*, Jesuit menyetujui rencana penyerahan wilayah misi Kepulauan Sunda Kecil kepada SVD, kecuali Flores. *Kedua*, Jesuit juga akan dengan senang hati menyerahkan kepada seorang misionaris SVD gaji kelas III yang selama itu diterima oleh pastor Jesuit yang melayani pulau Timor. *Ketiga*, keputusan mengenai harta benda tak bergerak milik Jesuit yang ada di misi Timor, akan menjadi wewenang Pater Superior Jeneral Jesuit dan Dewannya. Di penghujung suratnya, Luypen mengatakan dia akan menulis surat kepada Superior Jeneral Jesuit untuk mendapat keputusan final segera sesudah tanggapan balik dari Blum tiba di tangannya.⁵²

Karena surat Luypen hanya semata-mata bersifat meneruskan informasi saja, maka dalam tanggapannya, Blum hanya menyatakan bahwa informasi-informasi tersebut bisa menjadi dasar yang baik untuk memperteguh kesepakatan. Blum berkata demikian karena dia menyadari bahwa secara legal, keputusan seperti itu mesti diterima oleh SVD secara langsung dari pembesar Jesuit, bukan lewat perantara pihak lain. Tanpa menyinggung hal itu sama sekali dalam suratnya, Blum malah meminta Luypen untuk menyampaikan gambaran singkat atas pulau-pulau itu – terutama pulau Timor -, mengenai keadaan iklim, struktur tanah, suku bangsa, komposisi penduduk dan lain sebagainya. Dia juga ingin tahu lebih banyak mengenai kaum muslim, sarana transportasi antara Timor dan Sumba, jumlah umat Kristen dan berapa jumlah imam yang melayani mereka.⁵³

Dalam suratnya kepada Blum, 12 Desember 1910, Luypen menyatakan bahwa setibanya di Hindia Belanda, dia sendiri ingin secara pribadi berbicara dengan Provinsial Jesuit sekaligus *Superior Regularis Missionis* mengenai segala sesuatu yang telah ditulisnya kepada Blum hari-hari belakangan ini. Dia berharap, dengan cara ini, segala sesuatu berkaitan dengan pembagian wilayah misi akan menjadi jelas dan bahwa para pembesar Jesuit akan memiliki kesan baik sehingga akhirnya bisa sampai pada keputusan yang diharapkan kedua belah pihak.⁵⁴

Mgr. Luypen tiba kembali di Batavia dari liburannya yang mungkin “kurang menyenangkan” ini, 20 Maret 1911. Beberapa waktu sesudahnya, dia berkesempatan bertemu dengan P. Engbers SJ, *Superior Regularis Missionis* Jesuit dan mendiskusikan isu pembagian wilayah misi. Sebelumnya, tanggal 17 Maret (1911), ketika berada di Padang, Sumatera,

⁵⁰ Blum kepada Luypen, 22 Nopember 1910, AGSVD BL-5, 33.

⁵¹ Noyen kepada Blum, 6 September 1910, AGSVD 806, 23-24.

⁵² Luypen kepada Blum, 19 Nopember 1910, AGSVD 806, 27-28.

⁵³ Blum kepada Luypen, 22 Nopember 1910, AGSVD BL-5, 33.

⁵⁴ Luypen kepada Blum, 12 Desember 1910, AGSVD 806, 31-32. Surat ini ditulisnya ketika dia masih ada di Belanda.

Luypen sempat bertemu dengan Provinsial Jesuit Belanda, P. Isidorus Vogels SJ. Pada waktu itu, Vogels sedang dalam tugas visitasinya di Hindia Belanda.⁵⁵ Hasil dari pembicaraan-pembicaraan ini yakni bahwa semua yang disebutkan Luypen dalam suratnya kepada Blum, 19 Nopember 1910, disetujui. Sebelum mengakhiri suratnya, Luypen sekali lagi meminta persetujuan Blum, sebelum dia menyampaikan permohonan kepada Propaganda Fide di Roma menyangkut pemekaran lanjut wilayah vikariatnya.⁵⁶

Tanggapan Blum dibuatnya tanggal 11 Mei 1911 yang isinya menegaskan bahwa pada prinsipnya dia sepakat dengan usulan Luypen seperti dinyatakan dalam surat tertanggal 19 Nopember 1910 dan siap menerima tawaran misi baru tersebut. Blum lalu mempersilakan Luypen untuk mengambil tindak lanjut yang berguna seperti sudah disebutkan dalam suratnya.⁵⁷

4.3.6. *Negosiasi Tripartit*⁵⁸

4.3.6.1. Blum kepada Friedrich: “Cobalah ambil langkah yang perlu!”

Pater Superior Jeneral Nikolaus Blum SVD menilai bahwa telah tiba waktunya bagi Prokurator Jeneral SVD, Carl Friedrich⁵⁹, untuk memulai langkah-langkah yang perlu – namun perlu hati-hati – dengan Propaganda Fide menyangkut kemungkinan pembagian wilayah misi di Hindia Belanda.

Tanggal 11 Mei 1911, Friedrich menulis ke Steyl bahwa negosiasi dengan Propaganda Fide belum bisa dimulai. Mengingat Mgr. Luypen berencana untuk menulis surat ke Propaganda Fide, sebaiknya SVD membiarkannya untuk mengambil langkah pertama. Friedrich berpendapat bahwa jika surat dari SVD mendahului surat Luypen malah akan kontra-produktif karena potensial mengganggu kelancaran negosiasi. Pendapat Friedrich ini mengemuka karena pada saat yang sama urusan pengalihan misi di Jepang untuk SVD juga sedang dalam proses. Akan lebih bijaksana jika Propaganda Fide diberi keleluasaan untuk membereskan lebih dahulu urusan misi di Jepang ini.⁶⁰

4.3.6.2. Pemerintah Belanda Perlu Diberitahu

Tampaknya memang benar bahwa untuk mengambil-alih satu wilayah misi di Hindia Belanda itu tidak mudah. Dua minggu setelah kontak pertamanya dengan Propaganda Fide, Friedrich melaporkan ke Steyl bahwa surat dari Mgr. Luypen belum sampai ke Propaganda Fide. Sekretaris Propaganda Fide, Mgr. Laurenti mengingatkan bahwa negosiasi dengan pemerintah kolonial Belanda perlu ditempuh dengan sangat hati-hati. Jika salah langkah, pemerintah bisa saja tidak menyetujui rencana pembagian wilayah misi dimaksud. Karena itu, mungkin baik jika SVD-lah yang terlebih dahulu berbicara dengan pemerintah Belanda, bukan Propaganda Fide. Friedrich akhirnya menganjurkan agar Blum sendiri yang menangani urusan ini. Jika ternyata Blum berpendapat lain, Friedrich berencana untuk meminta bantuan

⁵⁵ Luypen kepada Blum, 12 Desember 1910, AGSVD 806, 31-32. P. Vogels menjabat sebagai Provinsial Jesuit di Belanda dari tahun 1908-1914. Cf. ARSI, *Prov. Neerlandica. Summaria Vita*. 1703, 301.

⁵⁶ Luypen kepada Blum, 12 April 1911, AGSVD 806, 37.

⁵⁷ Blum kepada Luypen, 11 Mei 1911, AGSVD 806, 38.

⁵⁸ Yang penulis maksudkan dengan negosiasi tripartit adalah pembicaraan di antara kedua kongregasi religius (Jesuit dan SVD), Vikaris Apostolik Batavia dan Prefek Propaganda Fide.

⁵⁹ Carl Friedrich menjabat sebagai Prokurator SVD dari tahun 1910-1931/1932. Seorang prokurator bertugas menjadi penghubung resmi satu kongregasi religius dalam berbagai urusan dengan Takhta Suci Vatikan. Data ini diperoleh penulis dari lembaga arsip Jeneralat SVD di Roma, 7 Desember 2006.

⁶⁰ Friedrich kepada Blum, 11 Mei 1911, AGSVD 806, 38.

dari Mgr. Brom, salah seorang teman dari Duta Besar Belanda, untuk memulai langkah pertama.⁶¹

Sesudah menerima laporan Friedrich, Blum memutuskan untuk memulai langkah pertama di Belanda. Agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang tidak perlu, lewat sepucuk surat, Blum coba meminta nasihat dari Wakil Provinsial Jesuit di Belanda, P. Schmeits SJ mengenai urusan ini. Pertimbangannya adalah Jesuit sudah sukses dalam urusan pembagian beberapa wilayah misi mereka. Karena itu, Blum berharap bahwa Pater Schmeits berkenan membagi pengalamannya dalam kasus seperti ini. Fokus utama Blum dalam usaha ini adalah mencari tahu jalan dan cara terbaik untuk berbicara kepada pejabat pemerintah Belanda.⁶²

Tidak ada seorang pun yang tahu pasti apa yang terjadi sesudahnya kecuali para Jesuit. Inisiatif Blum ini ternyata diikuti dengan satu pause panjang, paling kurang tiga setengah bulan lamanya. Provinsial Jesuit, P. Vogels SJ akhirnya memecah kesunyian yang tidak enak ini dengan mengirimkan satu jawaban singkat, sebagai berikut:

*Saya telah menerima satu surat, yang Anda kirimkan kepada wakil saya, Rev. P. Schmeits, berkaitan dengan transfer sebagian dari wilayah misi kami di Hindia Belanda. Saya juga menyesal bahwa urusan ini belum beres. Bagaimanapun juga, tetap ada sesuatu yang baik di sana; sebab dengan cara demikian, akan menjadi jelas bahwa mungkin ini yang diinginkan Allah. Saya berharap bahwa urusan ini akan tiba pada satu akhir yang baik, hal mana kami tidak ragu sedikit pun. Untuk itu, mari kita mendoakannya bersama-sama.*⁶³

4.3.6.3. Terlalu sedikit umat Katolik?

Para Jesuit yang terkesan tidak mau terburu-buru dalam negosiasi, langsung atau tidak langsung, telah menantang Pater Blum untuk membuktikan kesabarannya. Apa pun yang terjadi, ketekunannya tak tergoyahkan, sekalipun pada tanggal 13 September 1911, muncul satu kesulitan baru yang tak diduga sebelumnya, kali ini dari Propaganda Fide sendiri. Dikasteri ini tampaknya enggan untuk melakukan pembagian wilayah. Ada apa di balik semua ini?

Menindaklanjuti perkembangan ini, Pater Blum menulis kepada uskup Batavia. Dalam suratnya dia menyatakan bahwa persoalan utamanya adalah bahwa dalam rencana penyerahan wilayah misi, Vikaris Apostolik Batavia turut menyerahkan kepada SVD terlalu sedikit umat Katolik. Blum juga menegaskan bahwa sikap Propaganda Fide ini muncul sama sekali bukan karena campur tangan dari pihak SVD. Selanjutnya, dalam nada diplomatis yang indah, Blum menyatakan bahwa, yang jelas, Yang Mulia pasti lebih tahu cara terbaik untuk menghantar masalah ini ke akhir yang menyejukkan.⁶⁴

Dalam tanggapannya, Mgr. Luypen juga menyatakan bahwa penundaan ini bukan karena pengaruh dari pihak Jesuit. Dia sendiri, sampai saat itu, masih menanti tanggapan dari Propaganda Fide. Berbicara tentang sedikitnya umat Katolik di pulau-pulau Sunda Kecil yang hendak diserahkan kepada SVD, Luypen mengemukakan satu perbandingan yang baik dengan umat Katolik di kepulauan Kei dan Kalimantan. Luypen berpendirian bahwa jumlah umat Katolik di Kepulauan Sunda Kecil lebih banyak dua kali lipat dibandingkan dengan yang ada di kepulauan Kei, ketika wilayah itu diserahkan ke tangan MSC. Kemudian, jika dibandingkan dengan jumlah umat Kalimantan ketika diserahkan ke tangan Kapusin, jumlah

⁶¹ Friedrich kepada Blum, 29 Mei 1911, AGSVD 806, 45.

⁶² Blum kepada Schmeits, 8 Juni 1911, AGSVD 806, 46.

⁶³ Vogels kepada Blum, 23 September 1911, AGSVD 806, 48.

⁶⁴ Blum kepada Luypen, 13 September 1911, AGSVD BL-7, 185.

umat di Kepulauan Sunda Kecil masih lebih banyak sepuluh kali lipat. Herannya, pada waktu itu, banyak atau sedikitnya jumlah umat tidak dipersoalkan oleh Propaganda Fide. Atas dasar ini, Luypen berpendirian bahwa soal jumlah umat tidak sepatutnya dijadikan problem serius dalam negosiasi.⁶⁵

Pada bulan Oktober 1911, Pater Superior Jeneral Blum memulai visitasinya ke Togo, yang membawa dirinya jauh dari Jeneralat SVD di Steyl, sampai dengan Januari 1912.⁶⁶ Sementara itu, dalam bulan Nopember, ketika Blum tidak ada di Steyl, Pater Friedrich melaporkan perkembangan situasi terbaru di Propaganda Fide kepada Wakil Superior Jeneral, P. Johann Bodems SVD. Dia menyampaikan bahwa menurut Mgr. Laurenti, Kardinal Sekretaris Propaganda Fide, untuk sementara waktu, SVD bisa menempuh “langkah yang biasa”. Yang dimaksudkan adalah SVD bisa mulai bekerja saja di bawah yurisdiksi Vikaris Apostolik Batavia. Jika suatu waktu, “kaki SVD” sudah tertanam kuat di tanah misi tersebut, permohonan untuk pemisahan wilayah misi bisa diajukan kembali.⁶⁷

4.3.6.4. Petisi Blum ke Propaganda Fide

Anjuran Mgr. Laurenti kepada SVD untuk mengirim misionaris bekerja di bawah yurisdiksi Vikaris Apostolik Batavia, tampaknya mengafirmasi pendapat awal Blum ketika dia menulis surat perdananya kepada Mgr. Luypen, 24 Juni 1909. Karena itu, segera sesudah tiba di Steyl dari perjalanan visitasinya ke Togo, Blum langsung mengirim satu petisi (= surat permohonan) ke Propaganda Fide, lewat Prokurator Jeneral SVD, Carl Friedrich. Bersama dengan surat itu, dia juga melampirkan surat Mgr. Luypen, tertanggal 7 Desember 1911.⁶⁸

Isi petisi Blum tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa para misionaris SVD siap bekerja di bawah yurisdiksi Mgr. Luypen, tanpa perlu satu pemisahan wilayah misi secara formal. Lebih jauh, Blum meminta ketetapan tertulis dari Takhta Suci mengenai dua hal: *pertama*, sebuah dekret yang menjelaskan bahwa para misionaris SVD dapat memulai kerjanya di Hindia Belanda; dan *kedua*, satu pengakuan resmi terhadap rumah misi⁶⁹ di Belanda sebagai satu rumah formasi yang bertujuan untuk menyiapkan misionaris, khusus untuk Hindia Belanda.⁷⁰

4.3.6.5. Bagaimana kalau Timor dan Sulawesi?

Wlodzimierz Ledòchowski SJ⁷¹, Carl Friedrich dan para misionaris Jesuit tampaknya sependapat bahwa pembagian wilayah yang dianjurkan Luypen adalah satu pembagian yang kurang baik sehingga Propaganda Fide belum merestuinnya. Hal ini terbaca dari satu pembicaraan antara Ledòchowski selaku Asisten Superior Jeneral Jesuit waktu itu dengan Carl Friedrich. Pada kesempatan itu, dia membacakan satu surat dari pembesar Jesuit di Jawa

⁶⁵ Luypen kepada Blum, 7 Desember 1911, AGSVD 806, 49.

⁶⁶ Cf. Nuntius SVD Vol. I no. 24, September 1911, hlm. 136; bdk. K. Piskaty, dalam *Verbum SVD* 27 (1986), *Op. Cit.*, hlm. 67.

⁶⁷ Friedrich kepada Bodems, 15 Nopember 1911, AGSVD 806, 47.

⁶⁸ Blum kepada Friedrich, 21 Januari 1912, AGSVD 806, 50.

⁶⁹ Yang dimaksudkan oleh Blum di sini adalah rumah formasi SVD di Teteringen yang didirikan 3 Desember 1915, pada pesta St. Fransiskus Xaverius, pelindung misi. Informasi tentang pendirian rumah formasi ini sudah pernah dilaporkan oleh Prokurator Jeneral SVD, Carl Friedrich, kepada Prefek Propaganda Fide, tanggal 25 Januari 1912, sebelum rumah itu sungguh memulai “misinya” tahun 1915. Mungkin saja sampai saat itu, surat tersebut belum dibalas. Cf. Friedrich kepada Gotti, 25 Januari 1912, ASPF, Rubrica No. 125/1915, N.S. Vol. 560, 652; bdk. *Katholieke Missiën* 38, Juni (1913), hlm. 185.

⁷⁰ Blum kepada Friedrich, 21 Januari 1912, AGSVD 806, 50.

⁷¹ Wlodzimierz Ledòchowski menggantikan P. F.X. Wernz SJ menjadi Superior Jeneral XXVI Jesuit, 11 Februari 1915. Dia memangku jabatan itu sampai dengan 13 Desember 1942. Cf. William V. Bangert, dalam *Storia della Compagnia di Gesù*, Mario Colpo (ed.), Genova: Simki Srl., 1990, hlm. 553.

(= P. Eduard Engbers SJ) kepada Carl Friedrich, yang antara lain berisi penolakan penyerahan pulau Flores kepada kongregasi lain.⁷² Atas dasar itu, dan melihat keengganan Propaganda Fide dalam mengambil sikap yang diharapkan, Ledòchowski menganjurkan agar – sebagai langkah awal - SVD mengambil-alih saja Timor dan satu pulau besar lainnya yaitu Sulawesi, yang sampai saat itu dilayani sampai ke bagian utaranya saja. Alasan tersembunyi di balik munculnya nama Sulawesi adalah niat untuk menghambat laju perkembangan agama Protestan di pulau itu. Menurut Ledòchowski, para Jesuit akan mendukung pembagian wilayah demikian, sebab para pembesar Jesuit di Hindia Belanda pun menilai pembagian ini lebih masuk akal.⁷³

Selanjutnya, Ledòchowski menganjurkan agar Friedrich meyakinkan Propaganda Fide bahwa Jesuit akan mempertimbangkan pembagian wilayah seperti disebutkan di atas. Superior Jeneral Jesuit juga akan menulis surat ke Propaganda Fide sehingga ijinan bagi SVD untuk memulai karya misi di Hindia Belanda bisa segera dikeluarkan. Sebagai langkah awal, SVD boleh lebih dahulu mengambil stasi misi di Timor. Jika SVD menerima tawaran ini, tidak akan ada kesulitan berarti berkaitan dengan pengambilalihan Sulawesi yang dalam rencana akan diserahkan seluruhnya.⁷⁴

Steyl agak terkejut dengan rencana pengalihan Sulawesi, begitu juga Petrus Noyen yang waktu itu sedang berada di Köln, Jerman. Dalam pengamatan Noyen, tampaknya Steyl sudah mulai lupa akan “kesepakatan” yang dibuat bersama dengan Mgr. Luypen, 6 September 1910. Karena itu, Noyen menulis ke Jeneralat dan bersikeras menyatakan sikapnya bahwa dia tidak mau Flores jatuh ke tangan misionaris dari kongregasi lain.⁷⁵

4.3.6.6. Perkembangan negosiasi sebelum dekrit diterbitkan

Awal Februari 1912, Mgr. Luypen yang waktu itu berada di Batavia, menerima satu surat resmi dari Nuntius Apostolik di Brussels, Mgr. Giovanni Tacci, yang masa itu diberi wewenang atas Belanda dan Hindia Belanda sekaligus. Surat itu berkaitan dengan penyampaian Propaganda Fide mengenai Kepulauan Sunda Kecil. Isi surat itu menyatakan bahwa Propaganda Fide belum mau mengambil langkah lanjut mengenai pendirian satu prefektur apostolik baru untuk para misionaris SVD. Karena itu, untuk sementara waktu, misionaris SVD bisa bekerja di bawah yurisdiksi uskup Jesuit dalam teritori Jesuit. Luypen sendiri kemudian meneruskan hal ini kepada Blum.⁷⁶

Pada tanggal 6 Februari, Pater Friedrich menginformasikan kepada Blum mengenai anjuran untuk mengambil-alih, bukan hanya Kepulauan Sunda Kecil tetapi juga Sulawesi. Friedrich sebenarnya meneruskan informasi dari Pater Ledòchowski tentang persetujuan superior jeneralnya mengenai pengambilalihan stasi misi di Timor barat – di bawah syarat, Vikaris Apostolik Batavia mesti lebih dahulu menyatakan persetujuannya.⁷⁷

Semua surat-menyurat terakhir ini belum juga mampu menghalau awan kelabu yang terus membayang-bayangi proses negosiasi penyerahan wilayah misi kepada SVD.

Waktu	Peristiwa
24 Jun 1909	Surat pertama Blum ke Luypen: SVD bersedia bekerja

⁷² Hal ini baru ditulis kemudian oleh Carl Friedrich dan diteruskan kepada Blum setelah dia kembali dari Togo. Cf. Friedrich kepada Blum, 27 Januari 1912, AGSVD 806, 52.

⁷³ Friedrich kepada Blum, 27 Januari 1912, AGSVD 806, 52.

⁷⁴ Friedrich kepada Blum, 27 Januari 1912, AGSVD 806, 52.

⁷⁵ Noyen kepada Blum, 31 Januari 1912, AGSVD 806, 53-55.

⁷⁶ Luypen ke Blum, 5 Februari 1912, AGSVD 806, 56. Surat Nuntius Apostolik kepada Luypen itu tertanggal 17 Desember 1911. Cf. AGSVD 806, 57.

⁷⁷ Friedrich kepada Blum, 6 Februari 1912, AGSVD 806, 58-59.

	di bawah yurisdiksi Luypen
8 Des 1909	Luypen menjanjikan pembagian wilayah kepada SVD
6 Sept 1910	Luypen berkunjung ke Jeneralat SVD di Steyl, Belanda. Disepakati pemberian Kepulauan Sunda Kecil, <i>tanpa Flores</i>
19 Nop 1910	Jesuit setuju dengan anjuran Luypen kepada SVD
11 Mei 1911	Blum menerima tawaran Luypen dan Jesuit
22 Juni 1911	Luypen menyampaikan permohonan ke Propaganda Fide agar wilayah vikariatnya dimekarkan
13 Sept 1911	Propaganda Fide berkeberatan atas pembagian wilayah misi seperti disepakati di atas
15 Nop 1911	Propaganda Fide meminta SVD bekerja di bawah yurisdiksi Luypen
21 Jan 1912	Blum menerima permintaan Propaganda Fide
27 Jan 1912	Tawaran baru dari Jesuit: Timor (Kepulauan Sunda Kecil, tanpa Flores) ditambah Sulawesi

4.4. Legitimasi, Konfirmasi dan Realisasi (1912-1913)

4.4.1. Dekrit Propaganda Fide (8 Februari 1912)

Di tengah proses negosiasi yang tidak pasti kapan akan usai, satu dekrit dari Propaganda Fide akhirnya diterbitkan pada tanggal 8 Februari 1912. Dekrit yang dialamatkan kepada Superior Jeneral SVD itu, berbunyi sebagai berikut:

*Sebagaimana sudah disampaikan kepada Dikasteri ini bahwa para misionaris Serikat Sabda Allah, yang Anda pimpin secara pantas, telah siap untuk memulai karya evangelisasi di Vikariat Apostolik Batavia, tepatnya di pulau-pulau yang dikenal dengan nama "Kepulauan Sunda Kecil". Hal ini amat berkenan bagi Kongregasi Suci ini, sebab uluran tangan yang diminta sendiri oleh Vikaris Apostolik Batavia ini, sudah pasti akan membawa dampak besar bagi perkembangan agama kita di wilayah-wilayah pelosok tersebut. Demikianlah, dengan surat ini, Kongregasi Suci ini dengan ikhlas hati merestui bantuan kalian, menganugerahkan kepada para misionarismu sanjungan yang memang sudah layak diterima sekaligus menggugah mereka dengan sangat bahwa, untuk sementara waktu, dalam segala macam cara, selayaknyalah mereka menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada Vikaris Apostolik Batavia, dalam menjalankan tugas pelayanan imamat mereka, dan dengan sungguh-sungguh memohon bantuan ilahi dan rahmat surgawi yang berlimpah bagi mereka. Dan saya mohon agar Tuhan menjaga dan melindungi Anda senantiasa. Paternitatis Tuae Addictissimus Servus, F. G. M. Card. Gotti Praef. C. Laurenti Secret.*⁷⁸

⁷⁸ Gotti kepada Blum, 8 Februari 1912, ASPF, Rubrica No. 125/1915, N.S. Vol. 560, 654; bdk. AGSVD 806, 60-61; *Acta Apostolica Sedis*, Romae: Typis Polyglottis Vaticanis, 1913, hlm. 433. Karya ini selanjutnya akan disingkat AAS. Teks aslinya dalam bahasa Latin berbunyi sebagai berikut: "Relatum fuit huic S.C. [Sacrae Congregationi], Missionarios Societatis Verbi Divini, cui digne P.T. [Paternitas Tua] praest, paratos esse ad evangelizationis opus suscipiendum in Vicariatu Apostolico Bataviensi, et praecise in Insulis vulgo «Saonde Minori» dictis. Quod quidem pergratum exstitit huic S.C. [Sacrae Congregationi], cum novum hoc auxilium, a R. P. D. Vicario Apostolico Bataviensi expetitur, magnum profecto N.R. [Nostrae Religionis] augmentum remotis in illis regionibus sit allaturum. Dum itaque per praesentes haec S.C. [Sacra Congregatio] hoc tuum auxilium libenter adprobat, Missionariorum tuorum zelum meritis laudibus prosequitur eosque adhortatur, ut

Dengan terbitnya dekrit ini, misi Kepulauan Sunda Kecil, secara *de jure*, dialihkan kepada SVD. Kendatipun demikian, para misionaris SVD masih harus berkarya di bawah yurisdiksi Vikaris Apostolik Batavia sebagai pembantu-pembantu setia dalam misi Jesuit di Hindia Belanda. Hal ini berarti, secara teknis, pulau-pulau itu masih tetap berada dalam genggaman para misionaris Jesuit.

4.4.2. Dekrit Yang Dipuja Sekaligus Dicela

Bagi SVD, dekrit ini adalah dekrit yang sudah lama ditunggu kehadirannya, namun bagi Jesuit ini dekrit yang tidak diharapkan. Mengapa Jesuit bersikap demikian? Menilik isinya, paling kurang ada dua alasan pokok, yaitu *pertama*, perkembangan terakhir negosiasi antara Jesuit dan SVD, di mana Jesuit telah mengemukakan tawaran baru mengenai pemisahan wilayah misi, ternyata tidak diperhitungkan sama sekali oleh Propaganda Fide. Tawaran baru itu adalah Jesuit ingin menyerahkan pulau Timor dan Sulawesi kepada SVD. Dengan kata lain, diskusi seputar pembagian wilayah belum lagi tuntas. Karena itu, selain mengakui bahwa dekrit ini satu dekrit yang baik, pada saat yang sama Jesuit juga mengeluhkan dekrit ini sebagai satu dekrit prematur karena terbit sebelum waktunya. *Kedua*, dalam dekrit tersebut, Propaganda Fide jelas-jelas menyetujui agar para misionaris SVD berkarya di seluruh pulau yang termasuk dalam wilayah misi Kepulauan Sunda Kecil, tanpa pengecualian apa pun. Padahal, sudah sejak awal Jesuit dan Vikaris Apostolik Batavia telah menyatakan dengan jelas bahwa SVD bisa mengambil-alih wilayah misi Kepulauan Sunda Kecil, kecuali pulau Flores. Karena itu, dekrit ini dianggap melukai Batavia dan Jesuit.⁷⁹

Kalau begitu, apa yang menjadi latar belakang sampai Propaganda Fide berani menerbitkan dekrit seperti ini? Menurut Kurt Piskaty, seorang sejarawan terkemuka SVD, dekrit itu terbit karena negosiasi telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun. Propaganda Fide mungkin saja menganggap bahwa negosiasi di antara kedua kongregasi religius terkait sudah lumayan maju. Propaganda Fide juga seakan mau memperingatkan Jesuit dan SVD bahwa negosiasi mesti sampai pada tahap pengambilan tindakan, bukan sebatas pembicaraan melulu.⁸⁰

Sekalipun dekrit itu tampaknya mengecewakan pihak Jesuit, isinya bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. Mgr. Luypen sendiri telah mengirim surat ke Propaganda Fide tujuh bulan sebelumnya (22 Juni 1911) dengan permohonan agar vikariatnya dimekarkan.⁸¹

4.4.3. Konfirmasi dan Surat Undangan

Menindaklanjuti dekrit tersebut, Blum mengirimkan kepada Vikaris Apostolik Batavia satu salinan dari keputusan Roma. Disertai satu surat bernada ramah penuh persaudaraan, Blum berjanji bahwa di penghujung tahun dia akan mengirim beberapa imam ke misi di Timor, sekaligus berusaha sejauh mungkin untuk mengganti para misionaris Jesuit yang sedang berkarya di beberapa pulau lain yang sudah “diserahkan” ke tangan SVD. Para misionaris SVD ini akan dipimpin oleh seorang Pembesar Misi yang diangkat oleh SVD. Sedangkan untuk urusan pelayanan pastoral (= *ministerium sacrum*), para misionaris SVD

interim omnimodam oboedientiam ac subjectionem R. P. D. Vicario Apostolico Bataviensi in exercitio sacerdotalis ministerii praesent, divinumque auxilium ac uberes caelestes gratias iisdem adprecat. Ego interim Deum rogo ut Te diutissime sospitem servet. Paternitatis Tuae Addictissimus Servus, F. G. M. Card. Gotti Praef. C. Laurenti Secret.” Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dibuat oleh penulis.

⁷⁹ Cf. K. Piskaty, *Op. Cit.*, dalam *Verbum 4* (1962), hlm. 71.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Cf. Luypen kepada Gotti, 22 Juni 1911, ASPF, Rubrica N^o 125/1915, N.S. Vol. 560, 646-647.

akan bergantung sepenuhnya pada ketentuan dan keputusan Vikaris Apostolik Batavia.⁸² Beberapa waktu kemudian, lewat satu surat resmi, P. Isidorus Vogels SJ, Provinsial Jesuit di Belanda, mengkonfirmasi penerimaan satu salinan dari dekrit Propaganda Fide.⁸³

Tanggapan dari Batavia pun terlihat sangat positif, sejalan dengan keputusan Roma. Lewat suratnya kepada Blum tertanggal 21 April 1912, Mgr. Luypen langsung mengundang para misionaris SVD dari Steyl untuk menggantikan para imam Jesuit yang berkarya di pulau Timor dan Sumba. Pulau-pulau lainnya bisa ditangani kemudian, sambil terus berharap bahwa pada waktunya nanti Roma akan mengambil langkah lebih selanjutnya yakni pendirian satu prefektur apostolik yang baru.⁸⁴

Terbitnya dekrit ini ternyata sempat menarik perhatian kalangan pers. Harian Katolik "*De Tijd*" (artinya: Tempo), dalam laporannya tanggal 29 Maret 1912, menyatakan bahwa para imam dari Steyl (SVD) akan mengambil-alih misi Kepulauan Sunda Kecil dari tangan Jesuit. Selain itu, dalam majalah "*Steyler-Missionsbote*" (artinya: Bentara Misi-Steyl) dapat ditemukan pula satu pernyataan indah yang berbunyi: "Rumah induk Steyl akhirnya berbahagia karena boleh memiliki kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Belanda, atas hospitalitasnya yang dinikmatinya selama ini, lewat pengambilalihan satu wilayah misi di Hindia Belanda."⁸⁵ Hospitalitas Belanda yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah kesediaan para penduduk Belanda untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi rumah misi Steyl. Rumah misi itu didirikan di dekat perbatasan antara Belanda dan Jerman, di kampung Steyl, negeri Belanda, pada tahun 1875.

4.4.4. Misionaris Perdana SVD Tiba di Timor (20 Januari 1913)

Sampai dengan terbitnya dekrit Propaganda Fide, P. Petrus Noyen SVD adalah salah satu orang yang mengikuti dengan seksama setiap tahap negosiasi mengenai misi di Hindia Belanda. Dia sendiri ternyata tidak tinggal diam. Dia berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk misi baru tersebut dengan mempelajari bahasa Melayu, membiasakan diri untuk bisa hidup di daerah baru tersebut, dan memperkenalkan wilayah ini ke beberapa tempat di Belanda. Bahkan sebelum dirinya diangkat menjadi pembesar misi SVD di Hindia Belanda,⁸⁶ dia sudah punya rencana sendiri untuk misi baru tersebut. Misalnya, berkaitan dengan tenaga misionaris, dia sudah lebih dahulu mengajukan permohonan ke Jeneralat SVD untuk menyiapkan 3 orang imam dan 2 orang bruder bagi misi di Timor, sedangkan untuk Sumba dia minta 2 orang imam dan seorang bruder.⁸⁷ Menanggapi permohonan itu, Jeneralat mengambil tindakan menarik pulang P. Franz de Lange SVD dari misi di Amerika Serikat, P. Arnold Vestrælen SVD dari Togo, dan P. Constant van den Hemel SVD dan Br. Calixtus Osterholt SVD dari Papua Nugini. Dari Belanda sendiri mereka meminta kesediaan P. Johann Kreiten SVD dan P. Wilhem Baak SVD, juga empat orang bruder, yaitu Br. Lucianus Molken SVD, Br. Salesius van de Lith SVD, Br. Lambertus Schoren SVD dan Br. Willibrordus Donkers SVD. Semua mereka diminta kesediaannya untuk berangkat ke daerah misi baru tersebut.⁸⁸

Petrus Noyen sendiri sudah punya rencana matang untuk berangkat ke Hindia Belanda dalam bulan Desember 1912, segera sesudah pesta Natal. Namun ternyata panggilan tugas

⁸² Blum kepada Luypen, 15 Februari 1912, AGSVD 806, 62-63.

⁸³ Vogels kepada Blum, 17 Februari 1912, AGSVD 806, 64.

⁸⁴ Luypen kepada Blum, 21 April 1912, AGSVD 806, 68-70.

⁸⁵ *Steyler Missionsbote* 32, 1912/13, hlm. 39.

⁸⁶ Pater Petrus Noyen SVD diangkat oleh Jeneralat menjadi Pembesar Misi di Hindia Belanda pada tanggal 7 Desember 1912. Cf. K. Piskaty dan J. Riberu, *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁸⁷ Noyen kepada Blum, 17 Oktober 1912, AGSVD 806, 71-81; bdk., J. D. Mukese dan E. Jebarus, *Indahnya Kaki Mereka. Telusur Jejak Para Misionaris Belanda*, Ende: Nusa Indah, 2004, hlm. 3.

⁸⁸ K. Piskaty, *Op. Cit.*, dalam *Verbum* 4 (1962), hlm. 72.

untuk berangkat ke tanah misi datang lebih cepat dari rencananya itu. Dalam bulan Oktober (1912), ketika sedang memberi retreat kepada suster-suster novis SSpS, dia mendapat berita bahwa P. van den Putten SJ⁸⁹ yang sedang bertugas di Timor jatuh sakit. Berita yang sampai ke telinganya lewat paman Pater van den Puten di Belanda itu, langsung mengubah rencana keberangkatannya. Apa yang melatarbelakangi keputusan mendadak ini? Tidak bisa dipastikan apa yang ada dalam benak Noyen pada waktu itu. Yang jelas, situasi misi di Timor yang memprihatinkan telah memaksa Noyen mengambil keputusan seperti itu. Pada waktu itu, P. van den Puten SJ adalah pastor pembantu P. Mathijssen SJ di Lahurus, Timor. Awal tahun 1912, dia berangkat ke Jawa untuk memulihkan kesehatannya. Sesudah itu, dia langsung dipindahkan ke Madiun, sebab Mgr. Luypen berharap bahwa para misionaris SVD tiba sebelum pesta Natal. Karena itu, Pater Mathijssen dibiarkan sendirian di Timor. Namun selang beberapa waktu kemudian, Pater Mathijssen juga jatuh sakit dan mesti segera berangkat ke Jawa untuk urusan pengobatan. Karena itu, Pater van den Puten terpaksa mesti dikembalikan ke posnya di Lahurus. Begitu tiba kembali di Timor, dia menulis satu kartu pos kepada pamannya di Belanda. Orang inilah yang kemudian menyampaikan berita itu kepada Pater Noyen. Begitulah kisahnya sehingga Noyen memutuskan untuk berangkat ke Timor lebih awal dari rencananya semula.⁹⁰

Kapal Tambora yang bertolak dari Marseille, Perancis Selatan, menuju Batavia tanggal 28 Nopember 1912, ternyata sudah penuh dijejali penumpang. Karena itu, Noyen terpaksa menunda keberangkatannya ke tanggal 12 Desember 1912, dengan kapal Kawi. Pada tanggal 9 Desember dia menumpang kereta api cepat ke Paris. Selanjutnya dia menuju ke Marseille pada malam 11 Desember, sekali lagi dengan kereta api cepat. Akhirnya, 12 Desember (1912), P. Petrus Noyen SVD berangkat dengan kapal Kawi dari Marseilles, Perancis Selatan, menuju Batavia (sekarang: Jakarta), Hindia Belanda. Untuk pelayaran itu, Pater Noyen membutuhkan waktu selama ± 23 hari. Tanggal 4 Januari 1913, dia mendarat dengan selamat di Batavia. Pada hari itu juga dia bertemu dengan Vikaris Apostolik Batavia, Mgr. Luypen, dan berdiskusi dengannya mengenai “*radicaal*”⁹¹, misi Sumba dan penyerahan Flores kepada SVD.⁹² Dia juga sempat bertemu dan berbicara dengan P. Engbers SJ, *Superior Regularis Missionis* Jesuit di Hindia Belanda.⁹³ Diskusi dengan Engbers sekali lagi berkisar soal misi di Timor dan Sumba juga pengambilalihan misi Flores. Noyen dan Engbers juga mencapai kata sepakat mengenai sisa waktu bagi misionaris Jesuit untuk bertahan di misi Timor. Isi kesepakatannya yakni terhitung sejak tibanya Noyen di Timor sampai dengan 1 Maret 1913, dia akan diperlakukan sebagai tamu P. Mathijssen SJ. Namun mulai 1 Maret, Mathijssen akan berbalik menjadi tamu Noyen. Sementara itu, berkaitan dengan pengambilalihan Flores, Engbers berpendapat bahwa hal itu bisa diatur kemudian jika SVD sudah memiliki cukup tenaga misionaris.⁹⁴

Delapan hari kemudian (12 Januari), ditemani oleh P. Engbers SJ, dia menuju ke pelabuhan di Surabaya dan dari situ bertolak ke Timor, menumpang kapal Duymaer van Twist.⁹⁵ Kapal itu merapat dengan selamat di pelabuhan Atapupu, Timor, pada dini hari, 20

⁸⁹ Cf. P. Laan, *Sejarah Gereja Katolik di Timor*, II, Herman Embuiru (penterj.), Ende: -, hlm. 802-803.

⁹⁰ Cf. J. D. Mukese dan E. Jebarus, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁹¹ *Radicaal* adalah satu surat presentasi diri kepada Gubernur Jenderal dan dengan itu dia bisa menerbitkan ijin tinggal di Hindia Belanda. Tanpa ijin tinggal ini, seorang misionaris tidak bisa diangkat menjadi pastor paroki yang digaji oleh pemerintah. Ijin untuk Noyen diurus oleh Sir Wayenberg, seorang Katolik, yang bekerja sebagai sekretaris komite imigrasi di Batavia. Cf. P. Laan, *Sejarah Gereja Timor*, hlm. 804-805.

⁹² *Ibid.*

⁹³ J. D. Mukese dan E. Jebarus, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁹⁴ Cf. P. Laan, *Sejarah Gereja Timor*, hlm. 806-807. 836.

⁹⁵ Duijmaer van Twist diambil dari nama Gubernur Jenderal ke-50 untuk Hindia Belanda, Albertus Jacobus Duymaer van Twist. Pada masanya sebagai gubernur jenderal, dia menetapkan aturan yang cukup terperinci mengenai kerja paksa (*rodi*). Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan. Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djambatan,

Januari 1913, di mana sudah menanti P. Mathijsen SJ, P. van den Puten SJ dan Br. Moehle SJ. Beberapa anak sekolah juga turut hadir dalam acara penyambutan Pater Noyen, misionaris pertama SVD yang menginjakkan kakinya di tanah Timor, tempat pertama bagi misi baru SVD di Hindia Belanda.⁹⁶

Tanggal 18 Februari 1913, Br. Calixtus Oosterholt SVD tiba sebagai misionaris kedua SVD yang datang ke pulau Timor. Sesudah satu bulan lebih sembilan hari sejak misionaris SVD tiba, tanggal 1 Maret 1913 diadakan serah-terima daerah misi di Timor dari pihak Jesuit kepada SVD, masing-masing diwakili oleh Pater Mathijsen SJ dan Pater Petrus Noyen SVD. Sejak saat itu stasi Atapupu (Janilu) dan Lahurus (Fialaran) ditangani oleh misionaris SVD.⁹⁷ P. Arnoldus Verstraelen SVD dan Br. Lucianus Mólken SVD juga akhirnya tiba di Timor, 14 Mei 1913.

Visitasi pertama Mgr. Luypen ke Timor sesudah kedatangan para misionaris SVD, terjadi pada tanggal 16 September 1913. Dia tidak datang sendiri ke Timor tetapi ditemani oleh empat misionaris baru, yaitu P. Franz de Lange SVD, Br. Salesius van de Lith SVD, P. Wilhem Baak SVD dan P. Johann Kreiten SVD.⁹⁸ Para misionaris yang tiba terakhir ini menandai hampir lengkapnya (minus Br. Wilibrordus Donkers SVD) jumlah misionaris angkatan pertama yang ditunjuk oleh Jeneralat SVD untuk memulai misi baru di tanah Timor.⁹⁹

Waktu	Peristiwa
8 Feb 1912	Dekrit tentang misi SVD di Kepulauan Sunda Kecil diterbitkan
21 April 1912	Luypen mengundang SVD untuk mulai kerja di Timor dan Sumba
12 Des 1912	Misionaris pertama SVD (Petrus Noyen) bertolak dari Marseille, Perancis Selatan, menuju Batavia
4 Jan 1913	Noyen tiba di Batavia
12 Jan 1913	Dari Surabaya, Noyen berangkat ke Timor
20 Jan 1913	Noyen tiba di Atapupu, Timor
18 Feb 1913	Misionaris kedua, Br. Calixtus Oosterholt tiba di Timor
1 Maret 1913	Serah-terima misi Sunda Kecil dari Jesuit kepada SVD

5. Pendirian Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil

5.1. Negosiasi Sekitar Pendirian Prefektur

Urusan penyerahan wilayah misi memang sudah selesai dengan diterbitkannya dekrit 8 Februari 1912. Sekalipun demikian, masih ada satu urusan lain yang perlu dibereskan yaitu pendirian prefektur apostolik yang baru. Untuk urusan ini, pihak-pihak yang terlibat bukan hanya dari kalangan gerejani tetapi juga para pejabat negara. Khusus untuk pendirian prefektur apostolik Kepulauan Sunda Kecil, diplomasinya didahului oleh permohonan pemisahan wilayah dari uskup Luypen kepada pimpinan Propaganda Fide; tanggal 22 Juni

1983, hlm. 16; bdk. Wikipedia, (online), http://id.wikipedia.org/wiki/Albertus_Jacobus_Duymaer_van_Twist, diakses, 5 juli 2013, pukul 11.27.

⁹⁶ P. Laan, *Loc. Cit.*

⁹⁷ Cf. *Ibid.* Penyerahan misi Timor dari Jesuit kepada SVD akhirnya terjadi sesuai rencana. Pater Mathijsen sendiri meninggalkan Timor pada hari Sabtu, 24 Mei 1913, sebagai misionaris Jesuit terakhir yang meninggalkan daerah misi itu.

⁹⁸ J. D. Mukese dan E. Jebarus, *Op. Cit.*, hlm. 6.7.9; bdk., P. Laan, *Sejarah Gereja Timor*, hlm. 887.

⁹⁹ Cf. K. Piskaty, *Loc. Cit.*

1911 adalah tanggal yang tertera di atas surat Luypen kepada Kardinal Gotti, pimpinan Propaganda Fide.¹⁰⁰ Surat ini dikirimnya lewat perantaraan Internuntius Takhta Suci Vatikan untuk negeri Belanda, Mgr. Giovanni Tacci.

Sesudah surat yang menentukan itu, komunikasi tertulis mulai terjadi di antara tiga tokoh penting yaitu Tacci, Gotti dan Mery del Val (kardinal Sekretaris Negara Vatikan). Tugas Mgr. Tacci adalah mengurus diplomasi dengan pemerintah Belanda dan memastikan bahwa pendirian itu tidak terhalang oleh perkembangan situasi politik pada waktu itu. Sedangkan Mery del Val bertugas untuk menyampaikan rencana itu kepada Sri Paus Pius X (1903-1914) untuk mendapatkan perkenanannya. Jika rencana itu direstui, maka Mgr. Gotti dari Propaganda Fide akan menerbitkan dekret atas nama paus mengenai pendirian prefektur apostolik yang baru.

Menarik bahwa Gotti tidak terlalu entusias setelah menerima surat Luypen. Hal itu terjadi karena dia baru saja menyelesaikan urusan pendirian prefektur apostolik Sumatra (sekarang: Keuskupan Agung Medan) tahun 1911, Borneo-Belanda (sekarang: Keuskupan Agung Pontianak) tahun 1905 dan Kepulauan Kei- PapuaBelanda (sekarang: keuskupan Amboina) tahun 1902.¹⁰¹ Sebaliknya, Gotti malah mengajak Luypen untuk bekerjasama dengan para misionaris SVD yang memang sudah diberi wilayah Kepulauan Sunda Kecil. Karena itu, dia meminta Luypen untuk menyerahkan seluruh wilayah itu kepada para misionaris SVD tanpa syarat. Menurutnya, pendirian prefektur apostolik yang baru sebaiknya dibuat pada waktu yang lebih tampan. Semua pendapatnya ini disampaikan ketika dia membalas surat Mgr. Tacci.¹⁰²

Kendatipun mendapat reaksi seperti itu, ternyata Tacci tidak tinggal diam. Dia terus mengikuti perkembangan politik di negeri Belanda. Dia juga menyempatkan diri untuk berbicara dengan Menteri urusan Daerah Koloni pemerintah Belanda bahwa peningkatan status daerah misi Kepulauan Sunda Kecil menjadi satu prefektur apostolik sedang dalam proses penyelesaian. Hal ini disampaikan kepada Merry del Val yang kemudian meneruskan berita itu kepada Gotti.¹⁰³

Selang satu bulan sesudah itu, Tacci menulis lagi kepada Merry del Val. Kali ini suratnya diberi label “urgen”. Apa sebenarnya yang terjadi? Menurut Tacci, perkembangan terakhir politik negeri Belanda pada waktu itu mendesak Takhta Suci untuk segera bertindak kalau menghendaki agar prefektur apostolik yang baru jadi didirikan. Palsanya, dalam hitungan hari, akan terjadi pergantian kabinet. Tacci sempat mencium gelagat kurang bagus dalam diri calon Menteri urusan Daerah Koloni yang baru. Menurut informasi yang sampai ke telinganya, calon menteri itu tidak terlalu simpatik dengan umat Katolik di daerah-daerah jajahan. Besar kemungkinan bahwa sang calon menteri itu akan mempersulit proses pendirian prefektur baru yang direncanakan untuk Hindia Belanda. Karena itu, Tacci mendesak agar Takhta Suci bertindak cekatan sebelum terlalu terlambat. Menurutnya, sebaiknya pendirian prefektur apostolik Kepulauan Sunda Kecil dipercepat – bila perlu dengan tanggal yang dimajukan – selama Menteri urusan Daerah Koloni yang lama masih berkantor. Apalagi, seperti ketika disampaikan kepadanya, menteri yang lama itu tidak berkeberatan dengan rencana seperti ini.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Luypen kepada Gotti, 22 Juni 1911, ASPF-1, 646-647.

¹⁰¹ Catholic Hierarchy (online), <http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dmeda.html>, <http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dponi.html>, <http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dambo.html>, diakses, Minggu, 30 Juni 2013, pukul 17.30.

¹⁰² Gotti kepada Tacci, 18 Nopember 1911, ASPF-1, 650-651.

¹⁰³ Del Val kepada Gotti, 31 Agustus 1913, ASPF-2, 484-485.

¹⁰⁴ Tacci kepada del Val, 7 September 1913, ASPF-1, 657-658.

Empat hari sesudah itu, tepatnya 11 September 1913, Del Val menyampaikan berita urgen dari Tacci kepada Gotti agar dia segera bertindak sesuai dengan tuntutan situasi.¹⁰⁵ Merry del Val sendiri kemudian beraudiensi dengan Paus Pius X untuk membicarakan hal itu. Audiensi itu terjadi pada tanggal 16 September 1913 di mana Sri Paus menyatakan setuju dengan peningkatan status misi Kepulauan Sunda Kecil menjadi satu prefektur apostolik. Hasil audiensi itu kemudian disampaikan oleh Merry del Val kepada Gotti dalam satu surat tertanggal 17 September 1913. Gotti diminta, untuk atas nama Sri Paus, segera menerbitkan dekret mengenai pendirian prefektur apostolik Kepulauan Sunda Kecil.¹⁰⁶

5.2. Didirikan: Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil

Berdasarkan petunjuk kardinal Sekretaris Negara seperti disebutkan di atas, Propaganda Fide kemudian menerbitkan satu dekret tertanggal 16 September 1913 tentang pendirian prefektur apostolik kepulauan Sunda Kecil. Tanggal itu ternyata diambil dari tanggal pada hari di mana paus menyatakan persetujuannya. Nama Latin dari prefektur baru itu adalah *Insularum Sundae Minorum*.

Kalau dekret sebelumnya mengenai penyerahan wilayah misi Sunda Kecil kepada SVD (8 Februari 1912) sempat menuai kritik dari para Jesuit, dekret yang satu ini sebaliknya mendapat tanggapan positif. Propaganda Fide mendirikan prefektur baru itu dengan batas wilayah sesuai dengan hasil pembicaraan di antara uskup Luypen, para Jesuit dan SVD. Itu berarti wilayah prefektur apostolik itu tidak menyertakan Flores sebagai bagian wilayahnya. Hal itu dinyatakan jelas dalam isi dekret tersebut. Dekret itu berbunyi demikian:

*Dalam rangka mengembangkan iman Kristen di Kepulauan Sunda Kecil, yang sebelumnya menjadi bagian wilayah Vikariat Apostolik Batavia, sudah sejak kurang lebih dua tahun berlangsung, dikasteri ini telah terlibat dalam usaha penyerahan pulau-pulau itu kepada pelayanan para misionaris SVD dari Steyl dan berketetapan hati untuk mendirikan satu prefektur apostolik di pulau-pulau itu. Dan sekarang, mengingat karya kerasulan di sana sudah makin berkembang dan berjalan dengan baik, dikasteri yang sama, dengan perkenanan dari Sri Paus sendiri, lewat dekret ini, menyatakan bahwa prefektur apostolik Kepulauan Sunda Kecil – kecuali pulau Flores – secara resmi didirikan. Dikeluarkan di Roma, dari Takhta Kongregasi Penyebaran Iman, tanggal 16 September tahun 1913.*¹⁰⁷

Dekret ini kemudian dikirim kepada Nikolaus Blum SVD lewat Internuntius Vatikan, Giovanni Tacci. Kepada Mgr. Luypen di Batavia juga dikirimkan satu salinan dari dekret itu. Kardinal Sekretaris Negara sendiri mendapat satu salinan dari dekret itu lewat Kardinal Gotti, pimpinan Propaganda Fide.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Del Val kepada Gotti, 11 September 1913, ASPF-1, 659.

¹⁰⁶ Del Val kepada Gotti, 17 September 1913, ASPF-1, 660.

¹⁰⁷ “Ut in insulis Sundae Minoribus, quae ad Vicariatum Apostolicum Bataviensem iam pertinebant, nova promoverentur christianae fidei incrementa, haec S. Congregatio christiano Nomini Propagando easdem insulas, duobus fere abhinc annis, alumnis Societatis Verbi Divini de Steyl committendas curavit, novaeque Apostolicae Praefecturae in eisdem erigendae consilium inivit. Nunc autem, novis ibidem apostolicis operibus auctis atque solidatis, S. eadem Congregatio, accedente Summi Pontificis auctoritate, per praesens Decretum, praedictam Praefecturam, in insulis Sundae minoribus, ea tantum excepta cui nomen Flores, erectam declarat. Datum Romae, ex aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide, die 16 septembris, anno 1913.” (Dekret, 16 September 1913, PF-1, 662; Cf. AAS 1913, hlm. 433). Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dibuat oleh penulis.

¹⁰⁸ Gotti kepada Blum, 20 September 1913, ASPF-1, 666. Bdk. Gotti kepada del Val, 26 September 1913, PF-1, 664; Gotti kepada Luypen, 29 September 1913, ASPF-1, 665.

5.3. Prefek Apostolik

Bersamaan dengan urusan untuk mendapatkan persetujuan berbagai pihak sebelum dekrit diterbitkan, urusan lain yang tidak kalah penting pada waktu itu adalah menentukan orang yang tepat untuk jabatan prefek apostolik. Internuntius Tacci menanyakan kepada Propaganda Fide mengenai hal itu. Sampai saat itu, Mgr. Gotti sendiri masih menunggu jawaban dari pimpinan umum SVD. Kendatipun demikian, Tacci sendiri sempat menyebut nama P. Petrus Noyen SVD sebagai calon prefek ketika dia menulis surat kepada Sekretaris Negara. Nama kedua yang disebutkan adalah P. Arnoldus Verstraelen SVD, namun disertakan keterangan bahwa usianya masih terlalu muda untuk jabatan tersebut.¹⁰⁹

Pada tanggal 4 Oktober 1913, Prokurator Jeneral SVD, Carl Friedrich, menyampaikan tanggapan Nikolaus Blum kepada Kardinal Gotti. Isi suratnya pada intinya menyatakan bahwa Blum sangat setuju agar Petrus Noyen dipromosikan ke jabatan prefek apostolik dan diangkat menjadi prefek pertama untuk prefektur apostolik kepulauan Sunda Kecil.¹¹⁰ Akhirnya, pada tanggal 8 Oktober 1913, P. Petrus Noyen SVD diangkat menjadi Prefek Apostolik Kepulauan Sunda Kecil.¹¹¹

Berita mengenai pendirian prefektur apostolik dan prefek apostolik kepulauan Sunda Kecil baru diketahui di Timor pada tanggal 26 Nopember 1913. Berita yang dikirim lewat telegram itu diterima di Tubaki (Betun, Timor) oleh P. Petrus Noyen sendiri. Pada waktu itu, Noyen sedang dalam perjalanan pertamanya mengelilingi sebagian wilayah Dawan dan Belu Selatan dengan maksud untuk mengenal lebih dekat wilayah misinya.¹¹²

6. Satu Dua Kasus Khusus

6.1. Kasus Flores dan Penanganannya

6.1.1. *Para Misionaris Jesuit versus Pimpinan Umum Jesuit*

Sampai dengan terbitnya dekrit tentang Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil yang mengeluarkan Flores dari wilayah keprefekturan yang baru itu, tetap saja ada sesuatu yang terasa aneh dengan pembagian wilayah seperti itu. Di atas peta, Flores terletak di tengah gugusan pulau-pulau Sunda Kecil. Dalam soal pelayaran, Flores bisa menjadi “jembatan” yang menghubungkan pulau-pulau itu. Mengapa Flores tidak disertakan dalam prefektur yang baru? Dapatkah pembagian wilayah yang tidak natural ini dipertahankan lebih lama?

Para imam Jesuit sebenarnya sudah agak lama memikirkan nasib Flores, paling tidak sejak tahun 1911. Kepada Pimpinan Umum Jesuit di Roma, P. Engbers selaku pembesar misi pernah menulis bahwa mereka berencana untuk menyerahkan semua pulau yang terletak

¹⁰⁹ Tacci kepada del Val, 7 September 1913, ASPF-657-658; bdk. Tacci kepada Gotti, 27 September 1913, ASPF-1, 667-668; Gotti kepada Blum, 20 September 1913, ASPF-1, 666.

¹¹⁰ Surat Friedrich berbunyi sebagai berikut: “Rev. P. Noyen, anno 1870 natus, sacerdotio initiatus est 1893. Post acceptam ordinationem in Schantung meridionali sacro munere Missionarii magno successu est functus. Vir regularis disciplinae, pius, sagax est et in deliberationibus et agendi ratione ita prudentia excelluit, ut jure merito ad dignitatem Praefecti Apostolici promoveri possit”. Terjemahannya: Yang terhormat P. Noyen dilahirkan pada tahun 1870. Dia ditahbiskan menjadi imam tahun 1893. Sesudah tahbisan, dia bekerja sebagai misionaris di Schantung selatan (Cina) dengan sukses. Dia dikenal sebagai seorang religius yang baik, saleh dan bijaksana. Dia penuh pertimbangan dalam setiap tindakan dan keputusan-keputusan yang diambilnya. Semua kualitas dirinya ini menjadikan dia layak untuk dipromosikan ke jabatan seorang Prefek Apostolik. Bdk. Friedrich kepada Gotti, 4 Oktober 1913, ASPF-1, 672.

¹¹¹ Cf. AAS 1913, hlm. 518.

¹¹² J. D. Mukese dan E. Jebarus, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

sesudah bagian timur pantai pulau Jawa kepada SVD, kecuali Flores. Dengan penyerahan itu, Jesuit masih akan tetap bermisi di empat pulau lain yaitu Jawa, Madura, Flores dan Sulawesi. Engbers menyadari bahwa Propaganda Fide tidak simpatik dengan sikap Jesuit yang ingin terus mempertahankan Flores. Propaganda Fide berpendapat bahwa Flores yang memiliki jumlah umat Katolik yang lumayan banyak bisa menjadi tulang punggung iman untuk prefektur yang baru.¹¹³ Kendatipun demikian, Jesuit tetap bersikeras mempertahankan Flores. Sebagai jalan tengah, Pater Provinsial Jesuit Belanda pernah menganjurkan agar pulau itu dibagi dua saja di antara Jesuit dan SVD. Ternyata anjuran ini tidak disetujui oleh Engbers dan anggota dewannya. Mereka berpendirian lain malah menyatakan bahwa Sulawesi bisa diserahkan kepada misionaris lain tetapi Flores tidak boleh dibagi apalagi diserahkan seluruhnya. Sebagai jalan keluar, Engbers dan dewannya menawarkan Sulawesi kepada SVD.¹¹⁴ Sesudah dekret 8 Februari diterbitkan, Engbers menulis kepada P. F. X. Wernz, Pimpinan Umum Jesuit, demikian:

*... Provinsial mewanti-wanti kami untuk menghindari bahaya bahwa sebaiknya tidak terlalu banyak yang diijinkan masuk, pendirian prefektur apostolik yang baru [Sunda Kecil] akan tertunda, barangkali sampai jumlah misionaris SVD ini sama dengan atau melebihi jumlah misionaris Jesuit di Vikariat Batavia, dengan konsekuensi bahwa pada saat uskup kita meninggal dunia nanti, besar kemungkinan bahwa penggantinya adalah salah satu dari para imam SVD.*¹¹⁵

Rupanya surat ini ditulis sebagai reaksi atas sikap Vikaris Apostolik Batavia yang setuju untuk menerima beberapa misionaris SVD untuk mulai di misi Timor dan Sumba.¹¹⁶ Penerimaan ini merupakan satu langkah prospektif menuju pengambilalihan wilayah misi Sunda Kecil seluruhnya. Berkaitan dengan usaha untuk mempercepat proses pendirian prefektur apostolik kepulauan Sunda Kecil, Engbers masih meneruskan dalam suratnya kepada Wernz, sebagai berikut:

*... Semua kami berpendapat bahwa jika SVD memiliki lebih banyak tenaga misionaris yang nanti di Flores bukan hanya memperhatikan stasi-stasi misi yang kita tangani selama ini tetapi juga membuka lebih banyak stasi misi baru, sehingga kita – didesak oleh kebutuhan dan kebaikan jiwa-jiwa – mesti rela melepaskan Flores, sekalipun itu adalah tanah misi terindah dari antara misi di tanah-tanah kafir yang kita miliki. Seandainya Flores kita lepaskan, maka Roma akan segera mendirikan prefektur apostolik yang baru. Sementara ini, mengingat prefektur yang baru belum didirikan, dan karena para misionaris itu [SVD] diterima hanya untuk pulau Timor dan Sumba, jumlah mereka tidak akan bertambah sedemikian cepat sampai mendatangkan bahaya bagi pihak kita seperti diwanti-wanti oleh Pater Provinsial.*¹¹⁷

¹¹³ Catatan: Diskusi ini terjadi sebelum Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil didirikan.

¹¹⁴ Engbers kepada Wernz, 9 Desember 1911, ARSI-2, 23.

¹¹⁵ "...P. Provincialis noster nos nunc admonet de periculo ne si plures admittantur, et erectio novae Praefecturae [sic.] procrastinetur, fortasse numerus horum Patrum aequalis fiat imo major quam numerus nostrorum in vicariatu Bataviensi, ita ut moriente Episcopo nostro fortasse ipsi daretur successor ex Patribus S.V.D." Catatan: Tulisan dalam tanda kurung siku ditambahkan oleh penulis. Hal ini berlaku untuk seluruh kutipan dalam tulisan ini. Cf. Engbers kepada Wernz, 27 April 1912, ARSI-2, 24.

¹¹⁶ Bdk. Luyten kepada Blum, 21 April 1912, AGSVD 806, 68-70.

¹¹⁷ "...Censemus autem omnes, si Patres S.V.D. tantam habeant copiam operariorum ut in insula Flores non tantum stationes [sic] quas nunc nos ibi habemus possint occupare sed etiam novas stationes plures erigere, nos dura necessitate coactos, propter bonum animarum, debere cedere etiam insulam Flores, quamvis sit optima nostra missio inter paganos. Quodsi etiam insula Flores Patribus S.V.D. cedatur, probabiliter Roma magis parata inveniatur ad erigendam novam Praefecturam. Interim, nova Praefectura nondum erecta, quia Patres illi tantum

Dari bunyi surat di atas dapat diketahui bahwa Jesuit sulit melepaskan Flores karena Flores adalah wilayah misi yang sangat indah dalam arti sangat menjanjikan bagi perkembangan iman Katolik. Apa pun alasannya, Pater Wernz, Pimpinan Umum Jesuit, bersikap sebaliknya; dia merasa bergembira atas informasi seperti itu. Beliau bersikap sangat positif malah menegaskan bahwa kecemasan seperti itu sama sekali tidak beralasan dan bahwa demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa, Jesuit mesti siap untuk melepaskan Flores suatu saat nanti. Lebih dari itu, dia meminta para Jesuit di Hindia Belanda untuk memikirkan kembali persoalan itu. Mereka juga diminta untuk mempertimbangkan lebih serius bagaimana sebaiknya menangani persoalan itu secara komprehensif dan dengan cara sebaik-baiknya dalam kerjasama dengan para misionaris SVD.¹¹⁸

Pada kesempatan itu, Wernz juga meneruskan informasi bahwa SVD juga akan mengambil-alih misi Jesuit di Mosambik. Ini sesuatu yang tak terduga sebelumnya.¹¹⁹ Karena itu, Prokurator Jeneral SVD jauh-jauh hari sebelumnya sudah memberi peringatan mengenai akan adanya kesulitan tenaga dari pihak SVD untuk dikirim ke Hindia Belanda.

6.1.2. Alasan Utama: Kekurangan Tenaga Misionaris

Dalam perjalanan waktu, semakin jelas bagi Jesuit bahwa mereka tidak bisa lagi menyediakan misionaris untuk menjamin kesejahteraan rohani umat di Flores. Dibandingkan dengan Jawa, Flores lebih menderita kekurangan tenaga misionaris. Benar bahwa dalam diskusi mengenai penyerahan misi Sunda Kecil kepada SVD, mereka memutuskan untuk mempertahankan Flores. Pater provinsial yang juga hadir dalam diskusi itu memberi harapan bahwa hanya dalam waktu beberapa tahun, akan ada pengiriman tenaga misionaris baru ke Flores. Dalam rentang waktu tiga tahun, tiga misionaris berhasil dikirim ke Flores. Namun karena menderita sakit, terpaksa hanya dalam hitungan bulan, dua dari tiga misionaris itu mesti meninggalkan Flores. Di seluruh wilayah misi Flores, terdapat hanya 5 orang bruder, namun cuma satu di antaranya yang masih bisa bekerja dengan baik. Tahun 1913, dua orang bruder di Larantuka (Flores) meninggal dunia karena penyakit. Pater Muller yang ditugaskan untuk menangani misi di bagian selatan Flores (Sikka), terpaksa mesti menggantikan Pater Looymans. Lebih dari itu, hampir tidak ada lagi imam yang bisa menangani persekolahan atau menjadi pimpinan di daerah misi itu.¹²⁰

Menyadari situasi semakin berkurangnya tenaga misionaris untuk misi, Mgr. Luypen melaporkan hal itu kepada Propaganda Fide. Dalam suratnya tertanggal 24 April 1914,

admittuntur in insulas Timor et Soemba, non potest eorum numerus ita crescere, ut adsit periculum de quo monet P. Provincialis.” Cf. Engbers kepada Wernz, 27 April 1912, ARSI-2, 24.

¹¹⁸ Wernz kepada Engbers, 31 Mei 1912, ARSI-3, 329-330. Pada satu kesempatan lain, Wernz juga pernah menyampaikan kepada Provinsial Isidorus Vogels bahwa tidak ada cukup alasan untuk menahan Flores dari penyatuannya dengan wilayah prefektur apostolik Sunda Kecil dan bahwa para misionaris Jesuit bisa bertahan di pulau itu sampai mereka ditarik kembali oleh vikaris apostolik Batavia. Bdk. Wernz kepada Vogels, 29 Desember 1913, ARSI-4, 261-262.

¹¹⁹ Tahun 1910 pemerintah Portugis mengusir semua misionaris Jesuit dari Mosambik. Demi mempertahankan kelangsungan hidup misi di sana, Kardinal Merry del Val berinisiatif meminta kerelaan SVD untuk mengambil-alih wilayah misi itu. Dalam satu suratnya kepada Nikolaus Blum tertanggal 23 Juli 1911, Del Val menyatakan bahwa SVD tidak bisa menolak untuk menerima misi di Mosambik karena Jesuit akan diusir keluar dari sana. Persetujuan Steyl untuk mengambil-alih misi di Mosambik disampaikan tanggal 31 Juli 1911. Desember tahun yang sama, P. Henry Limbrock, mantan misionaris Togo, tiba di Mosambik bersama dengan 2 bruder dan 4 orang imam lainnya. Di bulan Desember 1919, segera sesudah Perang Dunia I, mereka semua juga diusir keluar dari negara tersebut. Cf. *Nuntius SVD*, Vol. I, no. 24, September 1911, hlm. 133; Fritz Bornemann, *Geschichte unserer Gesellschaft*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Dermot Walsh, *Analecta SVD* 54, Rome: Apud Collegium Verbi Divini, 1981, hlm. 203-204.

¹²⁰ Cf. Engbers kepada Wernz, 7 Desember 1913, ARSI-2.

Luypen mengakui kekurangan tenaga misionaris untuk misi di Sulawesi dan Flores. Semua ini disebabkan terutama oleh faktor penyakit dan usia lanjut.¹²¹

6.1.3. Flores Lepas dari Genggaman Jesuit

Sebenarnya setahun sebelum Engbers menulis kepada Pemimpin Umumnya di Roma, dia sendiri sudah memiliki firasat bahwa Flores akan diserahkan kepada SVD. Engbers yang suatu waktu begitu getol mempertahankan Flores, menulis kepada Petrus Noyen demikian,

*Dari pihak kami [Jesuit] mestinya tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan Flores. Para imam kami yang sedang bekerja di Flores bisa terus bekerja di sana untuk prefektur selama waktu masih mengijinkan. Saya akan dengan ihklas hati mengusahakan ijinan yang perlu untuk maksud ini.*¹²²

Dengan surat Engbers ini, Pater Noyen yang bertahun-tahun menyimpan cinta khusus untuk Flores, semakin yakin bahwa penyatuan Flores ke dalam wilayah prefektur Sunda Kecil tinggal menunggu waktu. Keyakinannya ini bukan tanpa alasan. Semakin minimnya tenaga misionaris Jesuit dan kenyataan semakin pesatnya perkembangan Islam bisa menjadi alasan-alasan tak terbantahkan untuk penyatuan itu. Luypen sendiri dalam suratnya kepada Propaganda Fide menganjurkan agar Flores disatukan saja dengan prefektur Sunda Kecil. Pemerintah Hindia Belanda sendiri setuju bahwa wilayah prefektur sebaiknya disesuaikan dengan wilayah sipil yang ada.¹²³

Sebenarnya, sebelum menulis ke Propaganda Fide, Luypen sudah lebih dahulu menulis ke Internuntius Takhta Suci untuk Belanda dengan intensi dan permohonan yang sama. Informasi mengenai hal itu diteruskan oleh Engbers kepada Wernz dalam suratnya 7 Desember 1913. Engbers juga menyadari bahwa sekalipun SVD mengambil-alih Flores, untuk sementara waktu, mereka belum memiliki cukup tenaga untuk menangani persekolahan dan stasi-stasi misi yang ada. Karena itu, para misionaris Jesuit sebaiknya tetap dipertahankan di Flores sesudah penyerahan itu terjadi.¹²⁴ Mgr. Luypen dan P. Wernz tampaknya setuju dengan anjuran Engbers untuk mempertahankan para misionaris Jesuit di Flores. Kepada Propaganda Fide, keduanya menyampaikan permohonan yang sama agar misionaris Jesuit yang sampai saat itu bekerja di Flores tetap di sana di bawah pimpinan Prefek Petrus Noyen sampai tenaga misionaris SVD mencukupi untuk melayani pulau itu.¹²⁵

Sesudah menerima surat Luypen dan Wernz, Kardinal Gotti menyampaikan satu laporan kepada Kardinal Benedetto Lorenzelli (1853-1915), Pimpinan Kongregasi untuk Urusan Studi, mengenai perubahan batas wilayah Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil. Dalam laporannya dia menyatakan bahwa Luypen dan Jesuit sudah setuju agar pulau itu diserahkan kepada SVD. Laporan ini yang kemudian melahirkan dekret baru mengenai status pulau Flores dalam wilayah prefektur Sunda Kecil.¹²⁶

¹²¹ Luypen kepada Gotti, 24 April 1914, ASPF-1, 673.

¹²² "Von unserer Seite soll gegen eine Abtretung von Flores kein Widerstand mehr erhoben werden. Unsere Patres, die jetzt auf Flores wirken, könnten vorläufig noch in Ihrer Präfektur an der Arbeit bleiben. Gerne will ich die dazu nötigen Erlaubnisse einholen." Surat dari Engbers ini dilampirkan oleh Noyen dalam suratnya kepada Blum, 28 Januari 1913. Dia minta agar dikirim lebih banyak misionaris ke Flores. Cf. Noyen kepada Blum, 28 Januari 1913, AGSVD, 806, 82-84.

¹²³ Luypen kepada Gotti, 24 April 1914, ASPF-1, 673.

¹²⁴ Engbers kepada Wernz, 7 Desember 1913, ARSI-2.

¹²⁵ Cf. Luypen kepada Gotti, 24 April 1914, ASPF-1, 674; bdk. Wernz kepada Gotti, 29 Mei 1914, ASPF-1, 675-676.

¹²⁶ Gotti kepada Lorenzelli No. 20, July 1914, ASPF-1, 677-678.

6.1.4. Dekrit

Pada tanggal 20 Juli 1914, Propaganda Fide menerbitkan satu dekrit yang menjelaskan sekaligus mengesahkan pemisahan Flores yang sampai saat itu masih menjadi bagian dari wilayah Vikariat Apostolik Batavia dan menyatukannya dengan Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil. Dekrit itu berbunyi demikian:

Tahun lalu, Dikasteri ini, oleh perintah Bapa Suci Pius X, yang karena penyelenggaraan Tuhan adalah paus, menangani pendirian Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil. Dalam satu rapat yang digelar pada hari ketiga belas bulan ini, para anggota Dewan Yang Mulia dari Kongregasi Propaganda Fide ini memutuskan untuk memperluasnya dengan menambahkan ke dalamnya pulau Flores, yang terletak di kepulauan tersebut, yang mana lewat dekrit ini, mulai sekarang dikeluarkan dari teritori Vikariat Apostolik Batavia. Yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris Dikasteri ini, menyampaikan keputusan ini kepada Bapa Suci dalam satu audiensi pada hari yang sama. Bapa Suci dengan penuh rasa syukur menyetujui semuanya, mengesahkannya, dan memerintahkan agar satu dekrit diterbitkan untuk maksud itu. Diberikan di Roma, dari Takhta Kongregasi Propaganda Fide, tanggal 20 Juli 1914.¹²⁷

Empat hari setelah dekrit diterbitkan, Gotti menulis kepada Mgr. Luypen di Batavia dan P. Blum di Steyl untuk menyampaikan dekrit ini. Gotti juga meyakinkan Blum bahwa para misionaris Jesuit akan tetap bertahan di Flores untuk sementara waktu. Kepada Luypen Gotti juga mengingatkan agar setia pada janji untuk tidak menarik kembali para misionarisnya dari Flores sampai SVD memiliki tenaga yang memadai untuk melayani daerah misi itu.¹²⁸

Waktu	Peristiwa
22 Jun 1911	Luypen menulis ke Propaganda Fide meminta pemekaran wilayah vikariatnya
7 Sept 1913	Surat urgen dari Internuntius G. Tacci kepada Merry del Val
16 Sept 1913	Terbitnya dekrit tentang pendirian prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil
8 Okt 1913	Petrus Noyen diangkat menjadi Prefek Apostolik
24 Apr 1914	Luypen melapor ke Propaganda Fide mengenai kekurangan tenaga misionaris di Sulawesi dan Flores
20 Jul 1914	Dekrit tentang penyerahan Flores kepada SVD

6.2. Harta Benda Tak Bergerak dan Gaji Pastor

¹²⁷ “Insularum Sundaie Minorum Apostolicam Praefecturam, quam superiori anno S. haec Congregatio de mandato Ssmi. Domini Nostri Pii divina providentia PP. X. erigendam curavit, Emi Patres S. eiusdem Consilii Fidei Propagandae in comitiis die 13 vertentis mensis habitis, augendam esse decreverunt adiuncta insula Flores, in praedicto Archipelago sita, quae a territorio vicariatus apostolici Bataviensis per praesens decretum nunc distrahitur. Quam sententiam ab infrascripto S. Congregationis Secretario SSmo Dno. nostro in audientia eiusdem diei relatam, Sanctitas Sua in omnibus adprobare ratamque habere dignata est, praesensque ea de re Decretum fieri iussit. Datum Romae, ex aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide, die 20 iulii anni 1914.” Cf. Dekrit, 20 July 1914, ASPF-1, 681.

¹²⁸ Gotti kepada Luypen, 24 Juli 1914, ASPF-1, 680; Gotti kepada Blum, 24 Juli 1914, ASPF-1, 679.

Sudah sejak awal, isu harta benda misi menarik perhatian Mgr. Luypen dan Superior Jeneral SVD, Nikolaus Blum¹²⁹, bahkan sebelum negosiasi tentang teritori mencapai titik terang. Hal ini tampak dalam surat Luypen kepada Blum, 19 Nopember 1910. Dalam surat ini, Luypen menulis bahwa keputusan mengenai urusan ini menjadi bagian wewenang Superior Jeneral Jesuit.¹³⁰ Memang rasanya agak lucu untuk membicarakan kepemilikan harta benda ketika negosiasi belum beres. Inilah yang menjelaskan mengapa hal ini baru ditangani sesudah keluarnya dekrit Propaganda Fide, 8 Februari 1912, mengenai pengalihan misi Kepulauan Sunda Kecil kepada SVD.

Pada tanggal 30 Maret 1913, Pater Provinsial Jesuit, Isidorus Vogels SJ menulis kepada Superior Jeneralnya, P. F. X. Wernz SJ, guna meminta petunjuk mengenai status kepemilikan harta benda tak bergerak di Timor. Ada dua stasi di sana, masing-masing dengan harta bendanya sendiri-sendiri. Harta benda tak bergerak yang ada di Atapupu adalah satu rumah bebek, satu rumah permanen, satu bangunan gereja, sekolah dengan bangunan-bangunannya, dan kuburan. Sementara itu, di Fialaran (Lahurus), ada satu rumah pastoran yang masih baik, satu bangunan sekolah lengkap dengan asramanya, satu bangunan gereja yang baru selesai dibangun, dan satu bengkel kayu. Menurut perhitungan para imam Jesuit, harta benda Jesuit di Timor seluruhnya, jika diuangkan, senilai 25.000 gulden, sedangkan di Flores senilai 200.000 gulden. Siapakah yang berhak memiliki semua harta benda ini?¹³¹

Menyangkut gaji pastor¹³² yang biasa dibayar oleh pemerintah Hindia Belanda, Luypen menulis ke Blum pada tanggal 19 Nopember 1910 bahwa satu gaji kelas tiga – itu adalah gaji seorang Jesuit yang bekerja di Timor – akan diserahkan dengan ikhlas kepada misionaris SVD.¹³³ Ketika Flores diserahkan kepada SVD, para imam Jesuit di sana bertanya apakah gaji mereka juga akan diserahkan kepada SVD? Di sana ada beberapa imam Jesuit yang menerima gaji kelas dua. Mereka ingin menyerahkan gaji kelas tiga yang selama itu diterima oleh 5 orang Jesuit kepada 5 orang SVD, sedangkan gaji kelas dua ingin mereka pertahankan.¹³⁴

Menanggapi beberapa pertanyaan di atas, Pater Wernz menjelaskan bahwa ada barang-barang yang memang bisa dengan gampang dibawa serta seperti buku dan barang pribadi lainnya ketika seorang misionaris meninggalkan wilayah misi tertentu. Namun barang-barang seperti bangunan gereja, sekolah, pastoran, sekalipun merupakan milik para misionaris Jesuit, semuanya mesti diserahkan kepada para pengganti Jesuit (para misionaris SVD). Dia juga mengingatkan para misionarisnya untuk berpegang teguh pada prinsip bahwa semua barang yang diserahkan pendermanya untuk tujuan misi, intensi utamanya adalah untuk menopang karya misi, bukan untuk menopang para misionaris dari kongregasi tertentu. Karena itu, semua harta benda seperti ini mesti diserahkan secara cuma-cuma. Jika ada pengecualian, misalnya ada orang yang berkeinginan menahan harta benda tertentu untuk kepentingan tertentu, yang bersangkutan mesti mendapat ijin langsung dari Takhta Suci. Mengenai gaji dari pemerintah, Wernz menegaskan bahwa permintaan para imam Jesuit di Flores hanya

¹²⁹ Bisa dipahami bahwa Blum menaruh perhatian serius pada urusan harta benda karena dalam serikat dia beberapa kali mengemban tugas sebagai ekonom. Bdk. J. Alt, *Journey in Faith*, hlm. 1032.

¹³⁰ Luypen kepada Blum, 19 Nopember 1910, AGSVD 806, 27-28.

¹³¹ Vogels kepada Wernz, 30 Maret 1913, ARSI-2, 4-I, 50; bdk. Wernz kepada Vogels, 29 Desember 1913, ARSI-4, 261-262.

¹³² Selama paruh pertama abad ke-20, pemerintah Belanda memberikan gaji kelas dua kepada para misionaris yang melayani orang-orang Eropa di tanah misi dan gaji kelas tiga diberi kepada para misionaris yang bekerja untuk orang-orang pribumi. Seorang uskup menerima gaji kelas satu. Cf. G. Vriens, *Op. Cit.*, hlm. 215. Satu gaji kelas tiga dinilai dengan uang sebesar 175 gulden, sedangkan gaji kelas dua sebesar 500 gulden. Bdk. Vogels kepada Wernz, 28 Juni 1914, ARSI-2, 2-I, 29.

¹³³ Luypen kepada Blum, 19 Nopember 1910, AGSVD, 806, 28.

¹³⁴ Vogels kepada Wernz, 28 Juni 1914, ARSI-2, 2-I, 29.

mungkin jika mereka tetap bertugas di Flores. Jika terjadi sebaliknya, maka gaji kelas dua yang ingin dipertahankan itu mesti dilihat sebagai gaji untuk orang yang bekerja untuk Flores. Karena itu mesti juga diserahkan kepada para pengganti imam Jesuit.¹³⁵

Setelah semua urusan ini dituntaskan, pada tanggal 15 April 1916, atas nama SVD, Blum menulis satu surat ungkapan terima kasih yang indah kepada Superior Jeneral Jesuit, P. Wlodzimierz Ledòchowski SJ (1915-1942), yang adalah pengganti P. F. X. Wernz SJ, menyangkut harta benda Jesuit di Timor dan Flores. Surat ini ditulisnya sedikit lebih kemudian, karena Blum masih menanti dibereskannya urusan yang sama di Flores dan sesudah ada pemberitahuan resmi dari Propaganda Fide. Pemberitahuan itu menyatakan bahwa Provinsi Jesuit Belanda mengalihkan dengan cuma-cuma kepada SVD semua properti mereka di Flores, sama seperti yang sudah dilakukan di Timor. Salah satu bagian surat dari Blum tersebut berbunyi demikian, “Untuk perhatian yang luar biasa mulia dan penuh kemurahan hati ini, saya merasa berkewajiban untuk mengungkapkan terima kasih kami seikhlas-ikhlasnya kepada Anda. Semoga Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada kongregasi Jesuit. Demikianlah ungkapan isi hati dan doa kami”.¹³⁶

6.3. Soal Pengakuan Pemerintah Belanda

Dari uraian sebelumnya diketahui bahwa selama proses negosiasi penyerahan wilayah misi, ketika berbicara tentang relasi Gereja dengan pemerintah, ada kecemasan besar tampak dalam sikap Mgr. Luypen dan pembesar misi Jesuit di Hindia Belanda, P. Eduard Engbers SJ. Apa yang menjadi latar belakang dari kecemasan mereka?

Sebenarnya ada aturan tertentu dari pemerintah Belanda yang perlu diindahkan dalam urusan mendatangkan orang baru – terutama misionaris – ke Hindia Belanda. Jika Luypen dan Engbers tidak mengindahkan aturan itu, mereka akan dengan mudah dituduh inkonstitusional dan hal itu akan menimbulkan kerugian bagi Gereja. Aturan yang dimaksudkan adalah Konvensi 1847 antara Takhta Suci Vatikan dengan pemerintah Belanda. Dalam konvensi itu digariskan bahwa pemerintah Belanda mengakui hanya satu vikariat apostolik untuk seluruh wilayah Hindia Belanda yaitu Vikariat Apostolik Batavia. Karena itu, bisa dipahami bahwa pemekaran wilayah Vikariat Batavia menjadi beberapa prefektur apostolik membawa kecemasan tersendiri bagi Mgr. Luypen dan pembesar Jesuit. Kecemasan itu bukan tanpa alasan. Masih jelas terbayang dalam ingatan Luypen bagaimana sikap pemerintah ketika prefektur apostolik kepulauan Kei-Papua Belanda dan Borneo didirikan, masing-masing pada tahun 1902 dan 1905. Luypen gagal dalam negosiasi dengan pemerintah Belanda. Persoalan dengan pemerintah ini kemudian dilaporkan Luypen kepada Propaganda Fide dalam bentuk sebuah memorandum. Di dalamnya dia menyampaikan bahwa karena Konvensi 1847, pemerintah Belanda tidak mengakui prefektur apostolik Borneo dan Kepulauan Kei-Papua Belanda. Sudah pasti bahwa sikap pemerintah ini akan berlaku juga bagi prefektur-prefektur baru yang akan didirikan kemudian.¹³⁷

Menanggapi memorandum Luypen, pada tanggal 25 Juli 1910, Kardinal Gotti meminta Kardinal Merry del Val, Sekretaris Negara Vatikan, untuk mengupayakan jalan keluar dari persoalan ini. Persoalan ini baru berhasil diselesaikan pada tanggal 12 Agustus 1913 dalam wujud satu kesepakatan antara Internuntius Takhta Suci Vatikan dengan pemerintah Belanda. Pada tanggal yang sudah disebutkan itu, kedua pihak sepakat untuk menambahkan dua artikel

¹³⁵ Wernz kepada Vogels, 29 Desember 1913, ARSI-4, 261-262; bdk. Engbers kepada Wernz, 16 Juni 1914, ARSI-2.

¹³⁶ Blum kepada Ledòchowski, 15 April 1916, ARSI-2, 2-I, 33.

¹³⁷ Luypen kepada Gotti, 1 Juni 1910, ASPF-2, 479-480.

penjelasan tambahan pada Konvensi 1847, yang kemudian dikenal dengan nama *Nadere Regeling* (= kesepakatan-kesepakatan tambahan).¹³⁸

Artikel pertama menyatakan bahwa pemerintah Belanda mengakui, selain Vikariat Apostolik Batavia, semua prefektur apostolik hasil pemekaran dari Vikariat Apostolik Batavia, termasuk yang baru didirikan, juga yang akan didirikan di kemudian hari, seturut pertimbangan pimpinan Gereja sendiri. Satu-satunya hal yang mesti dibuat oleh Gereja agar mendapat pengakuan pemerintah adalah menyampaikan kepada pemerintah prefektur-prefektur apostolik yang baru didirikan. Hal ini bisa dibuat lewat jalur diplomatik antara Internuntius dengan Menteri untuk Urusan Koloni. Dalam artikel kedua ditegaskan bahwa seorang prefek apostolik berhak untuk menempatkan atau memindahkan setiap imam di wilayah kerjanya tanpa campur tangan dari penguasa sipil atau pemerintah. Pemerintah hanya boleh campur tangan dalam urusan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan keamanan negara.¹³⁹

Dalam suratnya kepada Merry del Val tanggal 6 September 1913, Gotti menyampaikan ucapan terima kasih kepadanya. Menurut Gotti, Internuntius Takhta Suci berhasil dalam negosiasinya dengan pemerintah Belanda. Keberhasilan Internuntius adalah juga keberhasilan Sekretaris Negara Vatikan.¹⁴⁰

7. Rangkuman

Memperhatikan negosiasi yang terjadi, saya menggambarkannya sebagai satu proses yang ketika dimulai berlangsung lumayan cepat, di tengah jalan perlahan-lahan melambat, dan diakhiri secara tiba-tiba. Inilah yang menjadikan negosiasi ini unik dan karena itu juga menarik. Menarik bahwa ketika Arnold Janssen masih meraba-raba dalam kegelapan, mencari jalan bagaimana caranya boleh “sampai” ke satu tempat misi baru di Hindia Belanda, tak terduga, seorang misionarisnya di Papua Nugini, Constant van den Hemel, yang sedang berbelanja ke Batavia dan sendiri tidak tahu-menahu tentang rencana Jeneralat SVD, malah mendapat teman baru dari kalangan para Jesuit. Bahkan Vikaris Apostolik Batavia sendiri pun “ikut-ikutan” menjadi temannya. Siapa yang menyangka sebelumnya bahwa relasi sederhana yang terjalin ini pada akhirnya berujung pada penyerahan satu wilayah misi?

Menarik juga bahwa Constant van den Hemel yang sama, kemudian sekali lagi mendapat penugasan untuk berangkat ke Batavia, walaupun dengan satu tujuan yang lain sama sekali. Alih-alih pergi belajar untuk mengolah sawah, dia malah disulap menjadi seorang penggarap “kebun anggur” Tuhan, alias pekerja di wilayah misi Hindia Belanda. Constant van den Hemel memang kemudian menjadi salah satu dari antara para misionaris perdana yang diutus SVD untuk memulai misi di Timor.

Menarik sekaligus unik bahwa sejak awal dan selama proses negosiasi, ada beberapa kemungkinan tempat misi yang bisa diambil-alih oleh SVD, seperti: Jawa, Sumatera, Kepulauan Sunda Kecil tanpa Flores, Timor dan Sulawesi. Namun sejak awal, Nikolaus Blum tidak sedikit pun mau mengubah niatnya untuk mendapat hanya Kepulauan Sunda Kecil. Setelah tarik-ulur sana-sini, akhirnya yang diperoleh adalah Kepulauan Sunda Kecil juga.

Unik bahwa ketika negosiasi belum sampai pada kata sepakat, tak disangka dekrit Propaganda Fide sudah lebih dahulu diterbitkan. Pro-kontra itu akhirnya reda begitu saja beberapa saat kemudian. Selain itu, bakal prefektur apostolik baru yang pada saat awal kelihatannya tidak mudah didirikan, ternyata hanya dalam hitungan bulan sudah ada dekritnya. Tanggal 16 September 1913 menjadi hari bersejarah, karena pada hari itu Prefektur

¹³⁸ Gotti kepada Merry del Val, 25 Juli 1910, ASPF-2, 481; bdk. G. Vriens, *Op. Cit.*, hlm. 74.

¹³⁹ Merry del Val kepada Gotti, 31 Agustus 1913, ASPF-2, 482-483; bdk. G. Vriens, *Op. Cit.*, hlm. 216.

¹⁴⁰ Gotti kepada Merry del Val, 6 September 1913, ASPF-2, 487.

Apostolik Kepulauan Sunda Kecil resmi didirikan oleh Takhta Suci, lewat satu dekrit dari Propaganda Fide. Tidak sampai sebulan kemudian, tepatnya 8 Oktober 1913, Petrus Noyen pun diangkat menjadi Prefek Apostoliknya. Selain itu, pulau Flores yang sejak awal misionar dipertahankan oleh para misionaris Jesuit, akhirnya diserahkan pula ke tangan SVD lewat dekrit Propaganda Fide bertanggal 20 Juli 1914.

Mengenai urusan pengalihan harta benda dan gaji, sikap Pemimpin Umum Jesuit, P. F. X. Wernz SJ patut diacungi jempol. Wernz adalah seorang pemimpin yang memiliki nurani jernih dan pandangan luas. Atas nasihatnya, Jesuit akhirnya menyerahkan gaji yang menjamin hidup mereka dan seluruh harta benda mereka secara cuma-cuma kepada SVD. Syukur juga bahwa negosiasi Takhta Suci dengan pemerintah Belanda menyangkut Konvensi 1847 tidak mendapat halangan berarti, malah sangat berhasil dilihat dari isi kesepakatan mereka. Semua ini membantu perkembangan karya misi di Indonesia pada umumnya dan karya misi SVD pada khususnya.

Ada apa di balik semua ini? Apakah ini rentetan peristiwa yang terjadi secara kebetulan semata? Tentu tidak sesederhana itu. Yang pasti, semua peristiwa ini, langsung atau tidak, menegaskan bahwa mesti ada satu kekuatan lain yang turut bekerja aktif di balik negosiasi yang gampang-gampang sulit ini. Terlepas dari niat awal Arnold Janssen yang mencari tempat misi di Hindia Belanda demi popularitas belaka, negosiasi yang terkesan diakhiri secara mendadak ini juga menunjukkan satu kekuatan lain yang tak kasat mata. Karena itu, tidaklah berlebihan bila disimpulkan bahwa semua ini bukan semata-mata keinginan manusiawi belaka yang diwakili oleh peran tokoh-tokoh seperti Schwager, Arnold Janssen, Nikolaus Blum, Luypen, Engbers, Wernz, Vogels, Girolamo Gotti, Merry del Val, atau siapa pun juga, melainkan keinginan Tuhan sendiri. Ini maunya Tuhan. Tuhan mau agar SVD hadir di bumi Sunda Kecil; Tuhan mau agar SVD hadir di Indonesia!

8. Akhir Kata

Di usia misi SVD Indonesia yang keseratus tahun ini (1 Maret 2013), ketika kita menoleh kembali ke belakang, melihat saat-saat awal dengan kacamata manusiawi, terbersit satu kebanggaan di sana. Bangga karena semua ini dimulai oleh St. Arnold Janssen sendiri, Bapak Pendiri SVD, yang kala itu masih aktif dalam tugasnya sebagai seorang Pemimpin Umum (Superior Jeneral). Memang Arnold tidak sempat membawa usaha ini sampai ke titik final, namun paling tidak, dari fakta yang ada, kita tahu bahwa dia punya hati untuk perkembangan iman Katolik di Indonesia.

Syukur, karena berkat campur tangan Tuhan dan kerja keras beberapa tokoh seperti Blum, Luypen, Engbers, Noyen, Wernz, Gotti, Merry del Val dan beberapa pihak lain, akhirnya tanah Timor diberkati sebagai tempat pertama misi SVD di Indonesia, khususnya di Kepulauan Sunda Kecil. Tanah Timor telah menjadi saksi bisu detik-detik ketika misionaris pertama SVD, Petrus Noyen, tersenyum lebar pada “pantai idamannya” di mana hati misionernya berlabuh. Di pantai Timor, bersemilah “cinta pertama” SVD untuk wilayah ini. Dari Timor SVD kemudian melebarkan sayapnya ke Flores (1915), Sumba (1921), Mataram dan Bali (1935), Jawa (1954), Maluku (1967) dan Merauke, Papua (1969).